



Memaksimalkan Ikhtiar untuk **Kebaikan Umat**



Daftar Isi

Daftar Isi	2
Tema Laporan 2020	3
Ikhtisar Penting	4
Program Kemaslahatan Percepatan Penanganan COVID-19	4
Sambutan Kepala Badan Pelaksana BPKH	8
Sambutan Anggota Bidang Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan	11
Sambutan Deputi Bidang Kemaslahatan	14

3 **Meningkatkan Kesejahteraan Umat** **42**

Mendorong Produktivitas Umat
Membangun Pendidikan Umat

4 **Mengoptimalkan Insan Kemaslahatan** **54**

Sumber Daya Manusia
Pengembangan SDM

1 **Tentang Kami** **16**

Sekilas Bidang Kemaslahatan
Profil Bidang Kemaslahatan
Visi dan Misi
Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

5 **Tata Kelola Kemaslahatan** **60**

Tata Kelola
Asas Pengelolaan Keuangan Haji
Organ Pengelola Progeam Kemaslahatan
Manajemen Risiko
Kode Etik
Anti Korupsi
Sistem Pelaporan Pelanggaran
Pelibatan Pemangku Kepentingan

2 **Menyalurkan Nilai Manfaat** **24**

Dana Abadi Umat (DAU)
Program Kemaslahatan
Sinergi Bersama Mitra Kemaslahatan

6 **Tentang Laporan** **70**

Profil Pelaporan
Penentuan Kandungan Laporan
Indeks Standar GRI
Indeks POJK-51/2017

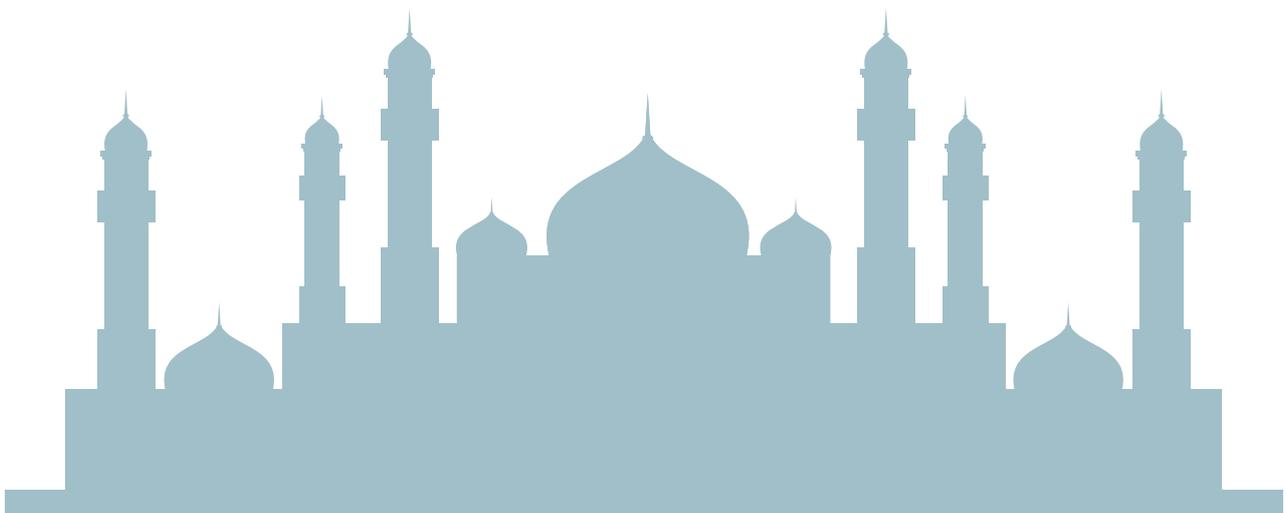
Memaksimalkan Ikhtiar untuk Kebaikan Umat

Tahun 2020, umat Islam dan seluruh bangsa Indonesia masih berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Kebijakan pembatasan aktivitas yang diberlakukan Pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 di tengah masyarakat turut memperluas tantangan dan dampak pandemi di masyarakat. Program Kemaslahatan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) merespon situasi ini dengan berupaya mengelola sumber daya dan ikhtiar untuk mampu melaksanakan mandat dan amanat umat secara optimal.

Komitmen ini diwujudkan melalui sejumlah inovasi dan terobosan. Selama tahun 2020 jumlah serapan dana manfaat di 5 dari 6 asnaf Program Kemaslahatan meningkat, begitu juga halnya jumlah kegiatan dari 81 kegiatan di tahun 2019 menjadi 186 kegiatan.

Program Kemaslahatan juga hadir merespon kebutuhan umat menghadapi pandemi melalui Program Kemaslahatan Percepatan Penanganan COVID-19.

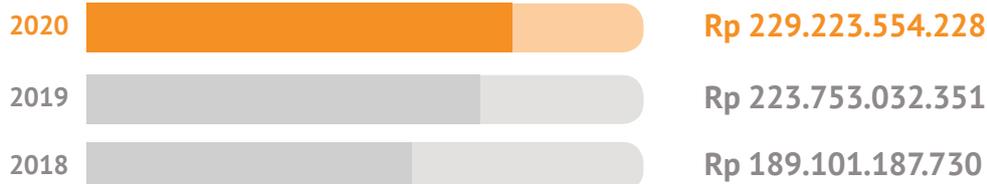
Pelaksanaan kegiatan Program Kemaslahatan juga menghadapi tantangan baru akibat penerapan kebijakan pembatasan aktivitas dan mobilitas demi mencegah penularan COVID-19 di masyarakat. Memanfaatkan teknologi informasi yang ada, kami menyiasati kondisi ini dengan melakukan koordinasi, monitoring dan pertemuan secara daring.



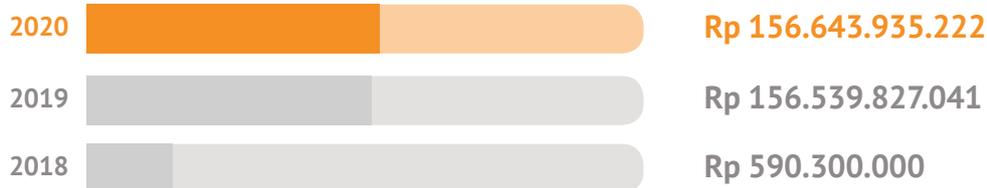


IKHTISAR PENTING

PEROLEHAN NILAI MANFAAT DAU



NILAI MANFAAT TERDISTRIBUSI



PROGRAM KEMASLAHATAN PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19

Rp44,259 M

Total realisasi program

34 Provinsi

Sebaran wilayah manfaat

18 Kegiatan

Jumlah program Kemaslahatan yang dilaksanakan

PROGRAM REGULER 6 ASNAF

Rp112,521 M

Total realisasi program

23 Provinsi

Sebaran wilayah manfaat



200.000+ Penerima Manfaat

Rp25 miliar

Investasi Sosial Melalui Cash Waqaf Linked Sukuk (CMLS) senilai

RENOVASI DAN PEMBANGUNAN

- ▶ Ruang Kelas di **22** Sekolah
- ▶ Asrama Santri di **25** Pondok Pesantren
- ▶ **2** Gedung Pondok Pesantren Baru
- ▶ **2** Rumah Tahfidz
- ▶ **21** Masjid
- ▶ **3** Musholla
- ▶ **1** Majelis Taklim
- ▶ Sarana Air Bersih **3** Sekolah/Pesantren dan MCK di 3

BANTUAN KENDARAAN OPERASIONAL

- ▶ **4** Mobil/Motor untuk Sekolah dan Pesantren
- ▶ **47** Ambulans
- ▶ **1** Mobil Jenazah
- ▶ **11** Unit Kendaraan operasional zakat
- ▶ **5** Unit mobil siaga bencana

PAKET BANTUAN

Rp500 juta

Sembako dan Keperluan Tanggap Darurat Korban Banjir Luwu Sulawesi Selatan

700

warga Penerima Donasi ATM Beras

PENINGKATAN EKONOMI UMAT

- ▶ **2** Alat Produksi Pertanian
- ▶ **1** Fasilitas Penggilingan Padi

314 Petani Penerima Manfaat Program Pemberdayaan Petani





Program Kemaslahatan Percepatan Penanganan COVID-19

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak akhir tahun 2019 lalu, telah menimbulkan dampak yang luas dan signifikan di Indonesia. Tidak hanya dampak pada sektor kesehatan, tapi juga sektor ekonomi, sektor pendidikan, sektor keagamaan, dan sektor lainnya yang mampu mengubah hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kondisi ini menjadi isu nasional yang memerlukan perhatian dan kepedulian seluruh komponen bangsa.

Sebagai bentuk pelaksanaan amanat dan tanggung jawab yang tertuju pada kepentingan umat, BPKH merespon kondisi ini dengan menyelenggarakan upaya cepat tanggap penanganan COVID-19 disamping juga tetap melaksanakan program kemaslahatan yang bersifat reguler.

Dukungan pelaksanaan Program Kemaslahatan Percepatan Penanganan COVID-19, ditunjukkan dengan realokasi anggaran kegiatan kemaslahatan, yang dituangkan dalam bentuk amandemen perubahan kedua atas Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 7 tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat (PBPKEH Nomor 4 tahun 2020).

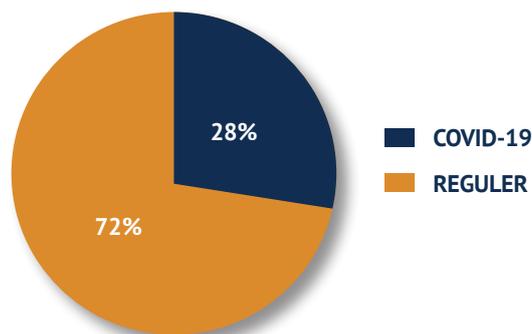
Sepanjang 2020, total dana yang disalurkan untuk Program Kemaslahatan Percepatan Penanganan COVID-19 adalah sebesar Rp44,259 M atau setara dengan 28% dari total nilai manfaat yang disalurkan pada Program Kemaslahatan.

Penyaluran nilai manfaat dilakukan melalui Mitra kemaslahatan dengan memfokuskan alokasi dana untuk memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana esensial dalam penanganan dan penanggulangan wabah penyakit, seperti mobil ambulance, mesin ventilator, pembangunan ruang isolasi mandiri hingga desinfektan untuk sarana publik seperti mesjid dan sembako bagi masyarakat.

Bantuan ini merupakan wujud peran aktif BPKH dalam mendukung Pemerintah Indonesia dan masyarakat dalam upaya pencegahan penyebaran virus Corona dan sekaligus membantu warga yang mengalami kesulitan ekonomi sebagai akibat kebijakan pembatasan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka.

Selain bantuan yang ditujukan untuk warga secara umum, Program Kemaslahatan juga menyalurkan bantuan program COVID-19 yang bersifat khusus yakni bantuan langsung tunai kepada 1.000 da'i, ustadz dan imam masjid yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi COVID-19. Program Kemaslahatan juga membantu pembangunan shelter dan ruang isolasi mandiri di sejumlah pesantren.

Program COVID-19 dan REGULER



Penerima Manfaat



10

Rumah Sakit



Paket APD dan alat kesehatan senilai
Rp8,36 miliar



Paket Sembako senilai
Rp21,94 miliar



8.000
Paket Desinfektan untuk Mesjid



47

Hibah Mobil Ambulans



7

Shelter dan Ruang Isolasi Pasien COVID-19 di pesantren



1

Mobil Jenazah



10

Ventilator Portabel Vent-I senilai Rp275 juta



ASNAF	TOTAL DANA	BENTUK BANTUAN
Kesehatan	Rp11.701.177.100	Alat Pelindung Diri (APD), pengadaan ambulans dan bantuan alat kesehatan.
Sosial Keagamaan	Rp24.818.183.080	Paket sembako dan sedekah hewan kurban.
Sarana dan Prasarana	Rp7.740.000.000	Bantuan disinfektan untuk masjid.



Sambutan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji



Dr. Anggito Abimanyu, MSc



“

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.

Q.S Al Baqarah:286

”

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Tanpa terasa kita sudah berada di tahun 2021, sesuatu yang patut disyukuri karena kita semua mampu bertahan dan melalui tahun 2020 yang penuh tantangan. Harus diakui, tahun 2020 menjadi perjalanan waktu yang sangat berat bagi dunia, tidak terkecuali Indonesia. Wabah pandemi COVID-19 yang menyebar ke berbagai negara di penjuru dunia tentunya menjadi fenomena yang mewarnai hampir sepanjang tahun. Tak hanya korban jiwa, wabah virus ini juga memberikan tekanan besar terhadap kinerja di berbagai sektor yang mengakibatkan resesi ekonomi global terburuk sejak Perang Dunia kedua.

Penanganan dan penanggulangan pandemi COVID-19 menuntut perhatian dan kepedulian semua pihak. BPKH turut prihatin atas wabah COVID-19 yang menerpa negeri ini, oleh karena itu kami turut mengambil peran melalui berbagai inisiatif sosial untuk memerangi penyebaran wabah dan dampaknya. Upaya ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, yang menyatakan salah satu tujuan pengelolaan keuangan haji adalah untuk meningkatkan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam di Indonesia.

Dalam rangka mendukung pemerintah dalam penanganan dan penanggulangan wabah penyakit Coronavirus Disease (COVID-19) yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional non alam oleh pemerintah pusat, BPKH telah melakukan upaya cepat tanggap penanganan COVID-19 dengan membentuk Program Kemaslahatan Percepatan Penanganan COVID-19.

Inisiatif BPKH untuk mendukung penanganan COVID-19 diawali dengan realokasi anggaran kegiatan kemaslahatan, yang dituangkan dalam bentuk amandemen perubahan kedua atas Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 7 tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat (PBBPKH Nomor 4 tahun 2020). Sepanjang tahun 2020, bantuan sebesar Rp44,259 miliar disalurkan melalui Mitra kemaslahatan yang secara spesifik ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana esensial dalam penanganan dan penanggulangan COVID-19.

Terlepas dari kegiatan penanganan COVID-19, BPKH melalui Bidang Kemaslahatan tetap menjalankan amanahnya untuk melaksanakan Program Kemaslahatan yang

difokuskan pada 6 (enam) asnaf atau ruang lingkup kegiatan kemaslahatan yaitu: pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi umat, serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah. Tidak dapat dipungkiri, situasi pandemi di tahun 2020 telah menjadi tantangan tersendiri dalam merealisasikan Program Kemaslahatan.

Kebijakan Pemerintah Indonesia untuk membatalkan keberangkatan Jemaah haji Indonesia di tahun 2020 dengan tujuan untuk melindungi kesehatan, keselamatan dan keamanan ratusan ribu Jemaah, menjadi faktor utama yang berkontribusi tidak tersalurkannya nilai manfaat pada asnaf pelayanan ibadah haji.

Selain itu harus kami akui, sebagian besar kegiatan Kemaslahatan yang dalam rencana dilaksanakan dan selesai pada tahun 2020 tidak dapat terwujud. Adanya pembatasan kegiatan selama masa pandemi, telah mendorong terjadinya keterlambatan. Namun ikhtiar terus dilakukan dan kami berkomitmen untuk tetap melanjutkan dan menyelesaikan program yang telah direncanakan. Program Kemaslahatan terus melakukan pemantauan untuk memastikan kegiatan yang direncanakan dapat selesai dengan tuntas di tahun 2021.

Namun kami cukup berbangga dengan pencapaian di tahun 2020. Asnaf ekonomi umat yang sejak awal diluncurkannya Program Kemaslahatan belum dapat diwujudkan, di tahun ini penyaluran nilai manfaat pada kegiatan asnaf tersebut telah berhasil direalisasikan. Dengan demikian nilai manfaat Dana Abadi Umat (DAU) yang ditujukan pada 6 (enam) asnaf Kemaslahatan telah lengkap. Disamping itu, BPKH juga turut berkontribusi dalam program strategis nasional yaitu *Cash Waqf Linked Sukuk* (COWLS) untuk pembangunan retina center dan renovasi Rumah Sakit Mata Achmad Wardi di Serang, Banten.

Sepanjang tahun 2020, total penyaluran nilai manfaat Dana Abadi Umat (DAU) melalui Program Kemaslahatan mencapai Rp156,780 miliar. Nilai yang hampir sama, jika dibandingkan dengan nilai yang disalurkan pada tahun 2019, yaitu sebesar Rp156,539 miliar. Namun jika dilihat dari peruntukannya, nilai yang disalurkan pada tahun 2020, mampu memberikan dampak yang cenderung lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Total kegiatan yang dilakukan oleh Program Kemaslahatan meningkat lebih dari 2 kali lipat, dari 81 kegiatan pada tahun 2019 menjadi 186 kegiatan ditahun 2020.



Dampak signifikan yang terlihat secara nyata terutama pada kegiatan asnaf ekonomi umat. Program Kemaslahatan pada asnaf ini didesain untuk mendukung masyarakat dalam menciptakan mata pencaharian atau meningkatkan usaha mereka. Dengan demikian diharapkan penerima manfaat program ini akan mampu menjadi umat yang berdaya dan mandiri secara ekonomi. Nilai manfaat disalurkan kepada pelaku usaha di sektor pertanian, peternakan maupun UMKM dalam bentuk hibah alat produksi, bantuan modal usaha, pembinaan dan pendampingan kelompok usaha warga atau kepala keluarga binaan. Nilai manfaat yang disalurkan secara total sebesar Rp1.001.150.000.

Sinergi dan kolaborasi dengan Mitra Kemaslahatan tetap dipertahankan dalam menjalankan Program Kemaslahatan. Kami meyakini menjalin kerjasama dan koordinasi dengan organisasi lembaga/badan amal zakat atau wakaf merupakan langkah strategis yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan utama meningkatkan kemaslahatan umat secara lebih efektif, efisien dan tepat sasaran.

Sementara itu, dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi dan kualitas penerapan tata kelola, mengacu pada Rencana Strategis 2021 BPKH, kami akan melakukan restrukturisasi dengan melakukan pemekaran menjadi dua divisi, yakni Divisi Registrasi dan Analisa Kemaslahatan dan Divisi Pelaksanaan dan Monev Kemaslahatan. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan independensi dan mencegah terjadinya *conflict of interest* dengan memisahkan alur kerja atau *work flow* antara kewenangan perencanaan, registrasi, analisa, dan persetujuan Program Kemaslahatan dengan kewenangan pencairan dan pelaksanaan serta monitoring program. Bidang Kemaslahatan juga akan menyusun *Standard Operational Procedure (SOP)* sebagai instrument yang melengkapi pembentukan divisi tersebut.

Seluruh Program Kemaslahatan yang kami jalankan merupakan cerminan langsung kontribusi BPKH terhadap pemerintah untuk mencapai sejumlah agenda tahun 2030 yang tertuang pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Sepanjang tahun 2020, Program Kemaslahatan yang dijalankan setidaknya telah berkontribusi pada 8 dari 17 tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Tahun 2021, meskipun segala upaya telah dilakukan, namun masa pandemi COVID-19 belum menunjukkan tanda-tanda akan segera usai. BPKH, melalui Program Kemaslahatan akan terus menjaga amanah dan berikhtiar

dalam menjalankan mandat menyalurkan nilai manfaat pengelolaan Dana Abadi Umat (DAU) sebaik mungkin, maslahat dan tepat sasaran.

Akhir kata, saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh pemangku kepentingan, kepada Pemerintah Indonesia, Mitra Kemaslahatan, penerima manfaat dan masyarakat yang telah memberikan kepercayaan dan dukungannya selama ini, serta kepada insan Kemaslahatan yang terus menunjukkan kontribusinya hingga BPKH mampu merealisasikan fungsi dan tujuan penyelenggaraan Program Kemaslahatan. Kami berkomitmen untuk terus berupaya menjadi lembaga pengelola keuangan yang terpercaya dan memberikan nilai manfaat optimal bagi Jemaah haji dan kemaslahatan umat Islam. Semoga Allah senantiasa meridhoi ikhtiar kami. Aamiin.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Dr. Anggito Abimanyu MSc

Sambutan Anggota Bidang Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan



Dr. Rahmat Hidayat, SE, MT

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pemangku Kepentingan yang Budiman,

Pandemi COVID-19 yang melanda telah memberikan dampak besar pada kesehatan, ekonomi dan sosial masyarakat. Tujuan penyelenggaraan Program Kemaslahatan untuk memberikan kemaslahatan bagi umat Islam, di masa pandemi ini menjadi lebih penting dari sejak diluncurkannya pada akhir tahun 2018. Kehidupan masyarakat selama masa pandemi sangat membutuhkan dukungan baik secara materi maupun non materi untuk bertahan dan berjuang memerangi krisis kesehatan ini.

Berdasarkan Peraturan BPKH Nomor 2 Tahun 2019, distribusi penyaluran nilai manfaat dari Dana Abadi (DAU) menasar ruang lingkup 6 (enam) kelompok kegiatan atau asnaf kemaslahatan. Selain itu, Program Kemaslahatan juga dapat mencakup kegiatan tanggap darurat yang ditujukan untuk mengatasi dampak ditimbulkannya sebagaimana diatur dalam Peraturan BPKH Nomor 4 tahun 2020.

Sejalan dengan mandat yang diberikan kepada Bidang Kemaslahatan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk menyalurkan nilai manfaat dari pengelolaan DAU untuk kepentingan masyarakat khususnya umat Islam di Indonesia, Program Kemaslahatan Tahun 2020 diselenggarakan mencakup 2 (dua) program utama, yaitu Program Kemaslahatan COVID-19 dan Program yang bersifat reguler.



Program Kemaslahatan COVID-19

Sebagai respon dan dukungan untuk percepatan dan penganggulangan pandemi COVID-19, penyaluran nilai manfaat pada masing-masing asnaf ditujukan secara spesifik untuk membantu dan meringankan beban masyarakat serta tenaga medis di berbagai wilayah dalam memerangi wabah COVID-19. Dalam kegiatan ini kami telah menyalurkan nilai manfaat sebesar Rp44,259 miliar yang setara dengan 28% dari keseluruhan dana yang disalurkan pada Program Kemaslahatan.

Bantuan diberikan dalam bentuk alat kesehatan, alat pelindung diri, serta sembako dan bantuan langsung tunai bagi masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi COVID-19. Selain itu, memahami tantangan yang dihadapi untuk melaksanakan pendidikan pada masa pandemi, kami juga membantu pembangunan shelter dan ruang isolasi mandiri di sejumlah pesantren.

Program Kemaslahatan Reguler

Sepanjang tahun 2020 sebaran kegiatan Program Kemaslahatan telah menjangkau 34 Provinsi di Indonesia, hal ini merupakan peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya menjangkau 15 Provinsi. Selain itu di periode 2020, Jawa Timur yang merupakan provinsi dengan prosentase jumlah Jemaah haji tunggu terbesar di Indonesia, telah menerima nilai manfaat terbesar dari seluruh total nilai manfaat yang disalurkan. Hal ini sejalan dengan peraturan yang berlaku, distribusi kegiatan Kemaslahatan haruslah dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan jumlah Jamaah haji tunggu yang ada di tiap provinsi.

Secara total kami telah mendistribusikan nilai manfaat DAU sebesar Rp156,780 miliar. Seluruh nilai tersebut telah tersalurkan ke 5 (lima) dari 6 (enam) asnaf kemaslahatan yang diatur pada Peraturan BPKH Nomor 2 tahun 2019. Penyaluran nilai manfaat pada asnaf pelayanan haji tidak terealisasi seiring dengan kebijakan Pemerintah untuk memprioritaskan keselamatan, sehingga keberangkatan Jamaah Haji tahun 2020 dibatalkan.

Pada asnaf kesehatan, selain program penanganan COVID-19, kami menyalurkan bantuan medis dan air bersih untuk menangani banjir bandang di Kabupaten Luwu dan pengadaan ambulance bagi organisasi kemaslahatan.

Pada asnaf sarana dan prasarana ibadah, kami menyalurkan bantuan berupa kebutuhan untuk operasional masjid, alat ibadah serta pembangunan dan renovasi masjid dan musholla.

Pada asnaf sosial keagamaan, kami juga memberikan bantuan berupa mobil siaga bencana pondok, mobil tangguh kebencanaan, serta kendaraan operasional untuk memudahkan organisasi kemaslahatan dalam melaksanakan kegiatannya. Nilai manfaat yang kami salurkan pada asnaf pendidikan dan dakwah mencapai porsi yang cukup besar yaitu Rp45,247 miliar atau 29% dari total nilai manfaat yang disalurkan pada seluruh Program Kemaslahatan.

Sementara pada asnaf ekonomi umat merupakan pencapaian kinerja kami yang cukup memuaskan. Karena sejak awal diluncurkannya Program Kemaslahatan, di tahun 2020 ini pertama kalinya kami dapat merealisasikan penyaluran nilai manfaat yang ditujukan untuk mendorong produktivitas umat yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Melalui kemitraan dengan 3 (tiga) Mitra Kemaslahatan, yaitu Daarut Tauhid (DT) Peduli, Rumah Zakat, dan Laznas BSMU, kami memberikan bantuan kepada pelaku usaha dalam bentuk alat produksi, bantuan modal usaha, pembinaan serta pendampingan.

Menghadapi kondisi darurat yang harus ditangani dengan cepat di saat itu juga, tanpa harus mengabaikan kegiatan regular lainnya bukanlah merupakan pekerjaan mudah bagi Tim Kemaslahatan. Namun mengingat tujuan dari seluruh kegiatan yang dilakukan adalah untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi umat, telah menjadi motivator bagi kami.

Berbagai ikhtiar kami lakukan untuk merealisasikan seluruh Program Kemaslahatan tahun 2020 yang telah direncanakan sejak awal. Namun sebagian besar kegiatan masih membutuhkan waktu untuk diselesaikan dan masih berlangsung di tahun 2021. Kami tetap berkomitmen untuk memegang teguh amanah umat, oleh karena itu pemantauan terus kami lakukan agar seluruh kegiatan dapat selesai dengan tuntas di tahun 2021.

Rencana Strategis 2021 Program Kemaslahatan BPKH

Sementara itu berdasarkan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tahun 2021, organisasi Program Kemaslahatan akan melakukan pemekaran menjadi 2 (dua) Divisi, yakni Divisi Registrasi dan Analisa Kemaslahatan dan Divisi Pelaksanaan dan Monev Kemaslahatan. Restrukturisasi tersebut, dalam rangka peningkatan tata kelola Program Kemaslahatan. Divisi Registrasi dan Analisa kemaslahatan akan dilengkapi dengan Manajer Registrasi Kemaslahatan dan Manajer Analisa Kemaslahatan. Sementara Divisi Pelaksanaan, Pelaksanaan dan Monev Kemaslahatan akan dilengkapi dengan Manajer Perikatan dan Monev Kemaslahatan dan Manajer Pencairan dan Pelaporan Kemaslahatan.

Melengkapi komitmen kami pada peningkatan kualitas penerapan tata kelola, Program Kemaslahatan pada tahun 2021 juga menginisiasi pengembangan aplikasi Sistem Informasi dan Manajemen (SIM) Program Kemaslahatan atau e-Kemaslahatan. Melalui aplikasi e-kemaslahatan ini seluruh proses bisnis kemaslahatan mulai dari proses pengajuan hingga laporan pertanggungjawaban proposal dana kemaslahatan yang berasal dari mitra kemaslahatan dan/atau penerima manfaat akan dilakukan secara digital melalui platform Program Kemaslahatan Web Based beserta Aplikasi versi Android.

Menyertai inisiatif digitalisasi tersebut, Bidang Kemaslahatan pada tahun 2021 juga akan menyusun Standard Operation Prosedure (SOP) yang akan memberikan panduan mulai dari perencanaan hingga evaluasi program. Seluruh inisiatif ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja tata kelola organisasi yang pada akhirnya mendorong peningkatan kinerja Program Kemaslahatan.

Penutup

Seluruh kinerja yang berhasil kami capai dalam penyelenggaraan Program Kemaslahatan juga merupakan buah dari kerjasama dengan Mitra Kemaslahatan. Pengalaman dan rekam jejak panjang yang mereka miliki telah mendukung terlaksananya kegiatan dengan tepat sasaran. Di masa mendatang kami berharap kolaborasi dengan mitra kemaslahatan akan terus ditingkatkan sebagai upaya akselerasi pencapaian tujuan yaitu meningkatkan kemaslahatan umat Islam.

Kami sangat mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kami selama ini. Komitmen memegang amanah untuk memberikan manfaat bagi umat akan selalu kami pegang teguh.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Dr. Rahmat Hidayat, SE, MT



Sambutan Deputy Bidang Kemaslahatan



Emir Rio Krishna, ST, MBA, MSc.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), khususnya Bidang Kemaslahatan dapat menjalankan amanah dalam melaksanakan Program Kemaslahatan yang bertujuan untuk meningkatkan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.

Di tengah kondisi pandemi COVID-19, kami menyadari penyelenggaraan Program Kemaslahatan haruslah mampu merespon dengan cepat kebutuhan masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran Virus Corona sekaligus untuk mengatasi dampak dari wabah

yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, nilai manfaat sebesar Rp44,259 miliar kami salurkan pada Program Kemaslahatan khusus penanganan COVID-19, bekerja sama dengan Mitra Kemaslahatan sehingga bantuan dapat disalurkan dengan lebih cepat dan mampu menjangkau masyarakat yang lebih luas di berbagai daerah di seluruh Indonesia.

Kami menyadari peran kami di Bidang Kemaslahatan tidak hanya menjalankan pekerjaan sebagai sebuah profesi namun merupakan pemenuhan tanggung jawab moral kepada umat. Sehingga sangat penting bagi kami untuk meningkatkan kinerja di setiap tahunnya dengan tujuan nilai manfaat yang disalurkan juga mampu meningkatkan kemaslahatan bagi umat.

Dengan penuh rasa syukur kami mampu mewujudkan hal tersebut. Kami berhasil meningkatkan kinerja di sepanjang tahun 2020 dengan segala keterbatasan dan tantangan yang dihadapi. Jangkauan wilayah penerima manfaat pada Program Kemaslahatan regular telah meningkat lebih dari 100% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang tentunya hal ini berbanding lurus dengan jumlah penerima manfaat.

Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, penyaluran nilai manfaat pada asnaf ekonomi umat merupakan pencapaian yang cukup membanggakan bagi kami. Penyaluran pada asnaf ini merupakan kunci penting untuk mengakselerasi peningkatan nilai manfaat yang berkelanjutan, bagi penerima manfaat langsung maupun bagi masyarakat disekitarnya. Selain itu, dana yang kami salurkan dalam Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) juga diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar.

Kami tidak dapat mengesampingkan peran dan kontribusi dari Mitra Kemaslahatan dalam pencapaian kinerja di sepanjang tahun 2020 ini. Bagi kami, hubungan kemitraan BPKH dengan organisasi lembaga/badan amil zakat atau wakaf merupakan suatu kolaborasi dalam menjalankan misi untuk mencapai tujuan yang sama. Kami yakin, dengan bekerjasama, kegiatan dapat dilakukan dengan lebih efektif, efisien dan tepat sasaran sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih besar dan luas.

Kami merasa strategi yang dijalankan di tahun ini cukup efektif. Di masa mendatang, kami akan terus berupaya dengan lebih baik lagi untuk meningkatkan kinerja yang pada akhirnya diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat, khususnya umat Islam di Indonesia.

Apresiasi yang sebesar-besarnya, ingin saya sampaikan kepada seluruh insan Kemaslahatan, yang telah mencurahkan energi, hati dan pikirannya dalam menjalankan Program Kemaslahatan di tengah-tengah masa yang penuh dengan tantangan. Terimakasih banyak Kepada seluruh pemangku kepentingan lainnya, Mitra Kemaslahatan, Pemerintah Indonesia serta umat Islam yang telah memberikan kepercayaan dan mendukung kami dalam merealisasikan Program Kemaslahatan.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Emir Rio Krishna, ST, MBA, MSc.





Tentang Kami



Sekilas Bidang Kemaslahatan

Bidang Kemaslahatan merupakan salah satu unit kerja Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Divisi ini memiliki tugas dan fungsi secara khusus untuk menyalurkan nilai manfaat yang bersumber dari Dana Abadi Umat (DAU). Dalam rangka mencapai salah satu tujuan pengelolaan Keuangan Haji yaitu meningkatkan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam, Bidang Kemaslahatan menyelenggarakan Program Kemaslahatan.

Melalui Bidang Kemaslahatan, BPKH menunjukkan komitmennya untuk menjadi lembaga pengelola keuangan yang tidak hanya berfokus pada unit bisnis melainkan dapat berkontribusi melalui kegiatan dalam rangka meningkatkan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.



KEMASLAHATAN

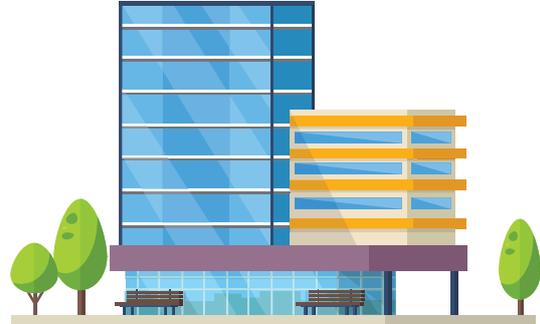


Profil Bidang Kemaslahatan



Kegiatan yang dijalankan

Menyalurkan nilai manfaat yang bersumber dari Dana Abadi Umat melalui kegiatan-kegiatan sosial untuk kemaslahatan umat Islam.



Alamat kantor pusat

Menara Bidakara 1, lantai 8
Jalan Gatot Subroto, Kav. 71-73 Pancoran, Jakarta Selatan 12870, Indonesia



Telp

(021) 83793001



Email

kemaslahatan@bpkh.go.id



Call Center Kemaslahatan

08882298820



Situs web

www.bpkh.go.id



Skala organisasi

Per 31 Desember 2020
Jumlah total pegawai :
6 orang
Nilai Dana Abadi Umat :
3,65 T



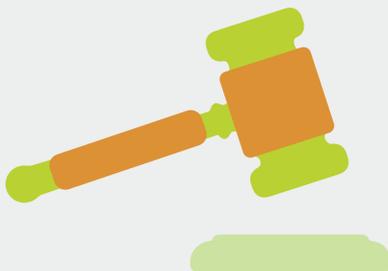
Pasar yang dilayani

Masyarakat di seluruh Indonesia
Jemaah haji di Indonesia dan di Arab Saudi



Wilayah operasional

Indonesia



Sifat Organisasi dan Dasar Hukum

Bidang yang berada di bawah naungan badan hukum publik pengelolaan keuangan haji atau BPKH.

Dasar hukum yang terkait dengan pembentukan:

1. UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji
3. Peraturan Presiden Nomor 110 tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji



Visi dan Misi

Sebagai lembaga keuangan yang memiliki badan hukum yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama, kami turut berupaya untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi yang telah ditetapkan BPKH.



Visi

Menjadi lembaga pengelola keuangan terpercaya yang memberikan nilai manfaat optimal bagi Jemaah haji dan kemaslahatan umat.



Misi

1. Membangun kepercayaan melalui pengelolaan sistem keuangan yang transparan dan modern.
2. Meningkatkan efisiensi dan rasionalitas BPIH melalui kerjasama strategis.
3. Melakukan investasi pada imbal hasil yang optimal dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian dan profesionalitas.
4. Menciptakan tata kelola dan sistem kerja yang komprehensif dan akuntabel dengan mengembangkan SDM yang berintegritas dan profesional.
5. Memberikan kemaslahatan untuk meningkatkan kesejahteraan umat.



Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Selama tahun 2020 Bidang Kemaslahatan BPKH turut mengambil peran dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Bentuk dukungan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut diwujudkan dalam Program Kemaslahatan. Dari 17 tujuan berkelanjutan kami turut berkontribusi setidaknya kedalam 8 tujuan :



RUANG LINGKUP PROGRAM	PROGRAM KEMASLAHATAN	INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN YANG RELEVAN
Sarana dan Prasarana	<p>Pembangunan shelter dan ruang isolasi untuk pasien COVID-19 di pesantren</p> <p>Bantuan mobil ambulans dan mobil jenazah</p> <p>Bantuan ventilator portable Vent - I</p>	 <p>Memerangi penyakit menular lainnya</p> <p>Mencapai cakupan layanan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko finansial, akses terhadap layanan kesehatan dasar yang berkualitas dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin yang aman, efektif, berkualitas dan terjangkau bagi semua</p>
Kesehatan	<p>Bantuan Alat Pelindung Diri (APD) dan alat Kesehatan untuk rumah sakit</p> <p>Investasi sosial berbasis syariah <i>Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)</i> untuk RS Mata Achmad Wardi</p>	 <p>Memerangi penyakit menular lainnya</p> <p>Mencapai cakupan layanan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko finansial, akses terhadap layanan kesehatan dasar yang berkualitas dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin yang aman, efektif, berkualitas dan terjangkau bagi semua</p>
Ekonomi Umat	Program Petani Tangguh	 <p>Mencapai dan memelihara pertumbuhan pendapatan dari 40 persen populasi yang paling bawah di tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional</p>

RUANG LINGKUP PROGRAM	PROGRAM KEMASLAHATAN	INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN YANG RELEVAN
Ekonomi Umat	Program Petani Tangguh	 <p>Mengakhiri segala macam bentuk malnutrisi, dan mengatasi kebutuhan nutrisi untuk para remaja putri, ibu hamil dan menyusui dan manula</p>
	Program Desa Binaan Rumah Zakat Cianjur dan Majalengka	 <p>Meningkatkan jumlah remaja dan orang dewasa yang memiliki keahlian yang relevan, termasuk keahlian teknis dan kejuruan, untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan wirausaha</p>  <p>Mengurangi setidaknya separuh dari jumlah penduduk miskin (laki-laki, perempuan dan anak dari segala usia) berdasarkan definisi nasional.</p>
	Hibah Alat Produksi untuk kelompok petani padi organik di Rejosari	 <p>Mengurangi setidaknya separuh dari jumlah penduduk miskin (laki-laki, perempuan dan anak dari segala usia) berdasarkan definisi nasional.</p>
Pendidikan dan Dakwah	Pengadaan sarana air bersih di pondok pesantren dan sekolah Islam	 <p>Mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua</p>
Laporan Keuangan yang transparan		 <p>Peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan lembaga</p>
Kemitraan dalam Program Kemaslahatan		 <p>Komitmen kemitraan publik, swasta dan masyarakat sipil</p>





**Menyalurkan
Nilai
Manfaat**



Dana Abadi Umat (DAU)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pengelolaan Dana Abadi Umat (DAU) yang merupakan bagian dari Dana Haji. Amanah ini mulai dilaksanakan sejak Kementerian Agama menyerahkan pengelolaan DAU kepada BPKH di tahun 2018. DAU adalah sejumlah dana yang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 diperoleh dari hasil pengembangan dan/atau sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang yang sama juga mengamanatkan pengelolaan Keuangan Haji dilakukan dengan asas prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kepentingan Jemaah haji dan kemaslahatan umat Islam. Sebagai upaya menjaga amanat tersebut, pokok DAU ditempatkan atau diinvestasikan pada instrumen yang memiliki tingkat atau profil risiko rendah dengan tetap memenuhi kriteria instrumen penempatan DAU sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Peraturan Pemerintah tersebut mengatur penempatan Dana Haji yang didalamnya mencakup DAU hanya dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan syariah. Besaran porsi dana haji yang bisa diinvestasikan hanya sebesar 20% dari total dana haji. Investasi itu disebar sebanyak 50% pada instrumen perbankan melalui Bank Umum Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS). Lalu sebanyak 20% di sukuk, kemudian 5% di emas, 15% di investasi langsung, serta 10% di investasi lainnya.

Salah satu tujuan pengelolaan Keuangan Haji adalah untuk meningkatkan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut salah satu pengeluaran dalam pengelolaan keuangan haji yang diperkenankan dalam undang-undang tersebut adalah pengeluaran untuk kegiatan kemaslahatan yang pendanaannya bersumber dari nilai manfaat atau hasil pengembangan DAU.

Legitimasi tersebut dikuatkan oleh keputusan ijtima ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Indonesia ke VI tahun 2018 yang menetapkan penggunaan nilai manfaat DAU dibolehkan selama digunakan untuk kemaslahatan umat dengan baik. Nilai manfaat DAU yang dapat digunakan untuk kegiatan kemaslahatan pada periode tahun berjalan, paling banyak sama dengan total nilai manfaat DAU dari tahun sebelumnya.

	2020	2019	2018
 Nilai pokok DAU (Rp)	3.578.600.057.835	3.570.529.860.018	3.483.740.762.715
 Nilai manfaat yang dihasilkan (Rp)	229.223.554.228	223.753.032.351	189.101.187.730
 Nilai manfaat yang disalurkan (Rp)	156.643.935.222	156.539.827.041	590.300.000
 Sisa nilai manfaat (Rp)	72.579.619.006	67.213.205.310	188.510.887.730

		2020	2019	2018
Nilai penempatan DAU	Investasi	3.311.864.162.851	3.318.869.779.732	1.471.308.703.000
	Bank Syariah	266.735.894.984	251.660.080.286	2.012.432.059.715
Nilai manfaat yang dihasilkan	Investasi	218.126.977.195	194.997.643.601	94.363.028.992
	Bank Syariah	11.096.577.033	28.755.388.750	94.738.158.738

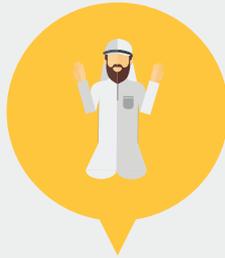
Program Kemaslahatan

Pilar Program Kemaslahatan



1

Hifdu Din
(Melindungi Agama)



2

Hifdu Nafs
(Melindungi Jiwa)



3

Hifdu Aqi
(Melindungi Pikiran)



4

Hifdu Mal
(Melindungi Harta)



5

Hifdu Nasab
(Melindungi Keturunan)

Program Kemaslahatan merupakan wujud nyata upaya BPKH dalam menjalankan amanat Undang-Undang RI Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Program ini telah mulai diluncurkan sejak akhir tahun 2018 dengan merujuk pada prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*. Prinsip ini memandang tujuan dari penetapan sebuah hukum adalah untuk meraih kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat alias kemaslahatan. *Maqashid Syariah* meyakini ada 5 tujuan penetapan hukum yang kemudian disepakati menjadi lima pilar Program Kemaslahatan.

Pelaksanaan Program Kemaslahatan menjadi tanggung jawab dari Bidang Kemaslahatan yang berada di bawah supervisi Deputi Kesekretariatan Badan dan

Kemaslahatan. Bidang Kemaslahatan memiliki wewenang dalam menyalurkan nilai manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan DAU untuk mencapai tujuan pengelolaan dana, yaitu meningkatkan kesejahteraan umat.

Penentuan kegiatan yang akan didukung oleh Program Kemaslahatan haruslah memperhatikan batasan yang mencakup bukan untuk salah satu dari kegiatan :

1. Berunsur keagamaan selain agama islam;
2. Untuk kepentingan golongan atau kelompok tertentu;
3. Yang akan melawan hukum atau bertentangan dengan perundangan yang berlaku;
4. Yang akan melanggar asas prinsip Syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel.



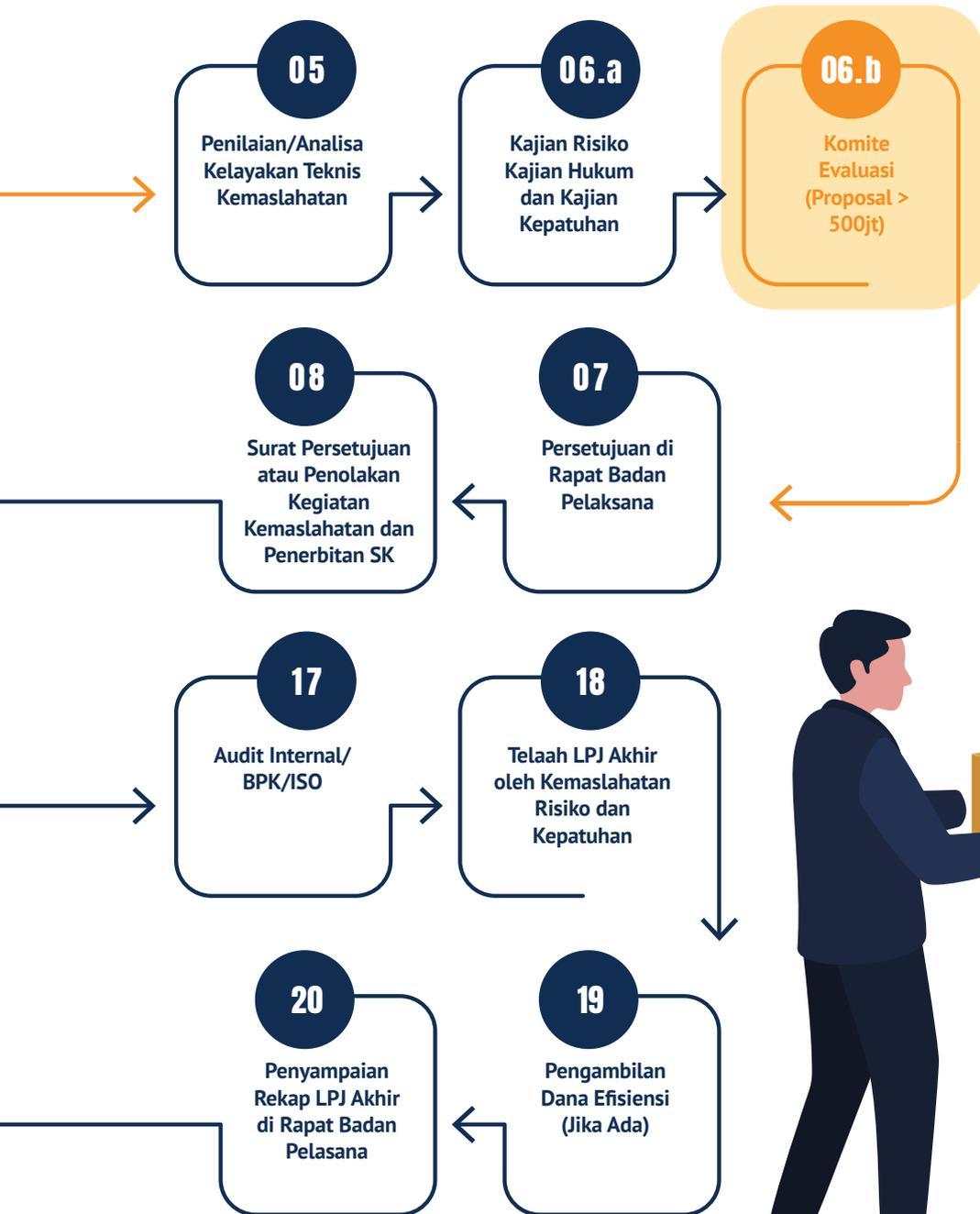
Dasar Hukum Program Kemaslahatan BPKH:

1. Undang Undang Nomor 34 Tahun 2014
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018
3. Peraturan BPKH Nomor 7 Tahun 2018
4. Peraturan BPKH Nomor 2 Tahun 2019
5. Peraturan BPKH Nomor 4 Tahun 2020
6. Peraturan Kepala BPKH Nomor 2 Tahun 2018
7. Peraturan Kepala BPKH Nomor 3 Tahun 2020 beserta perubahannya yaitu Peraturan Kepala BPKH Nomor 17 Tahun 2020
8. Peraturan Kepala BPKH Nomor 18 Tahun 2020
9. Peraturan Kepala BPKH Nomor 29 tahun 2020
10. Peraturan Kepala BPKH Nomor 34 tahun 2020



Mekanisme Penyaluran Nilai Manfaat





Kritikal Proses yang penting dan membutuhkan waktu sehingga perlu dipertimbangkan strategi untuk efektifitas.



Seluruh pemangku kepentingan, baik pihak internal maupun eksternal BPKH, dapat mengajukan proposal Kegiatan Kemaslahatan kepada Bidang Kemaslahatan melalui laman <http://www.kemaslahatan.bpkh.go.id> atau email kemaslahatan@bpkh.go.id. Setiap proposal yang masuk akan melalui mekanisme seleksi sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Agar manfaat DAU dapat tersalurkan secara adil dan efektif, Program kegiatan Kemaslahatan yang didukung haruslah mampu menjawab isu serta kebutuhan masyarakat. Kegiatan Kemaslahatan dilaksanakan berdasarkan prioritas kegiatan dan alokasi pagu

anggaran per asnaf Kemaslahatan yang ditetapkan oleh BPKH atas koordinasi dengan Kementerian Agama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sebagai upaya untuk menjaga akuntabilitas Program Kemaslahatan, Bidang Kemaslahatan telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu berdasarkan ISO 9001:2015. Pendekatan ini memastikan setiap tahapan dalam proses penyaluran nilai manfaat mulai dari penerimaan proposal hingga Kegiatan Kemaslahatan dinyatakan selesai, dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan memenuhi kriteria yang ditetapkan.



Proposal yang diterima

2020

750

2019

321



Proposal yang disetujui

2020

186

2019

81



Rawat Ina

Supported By :



BPKH

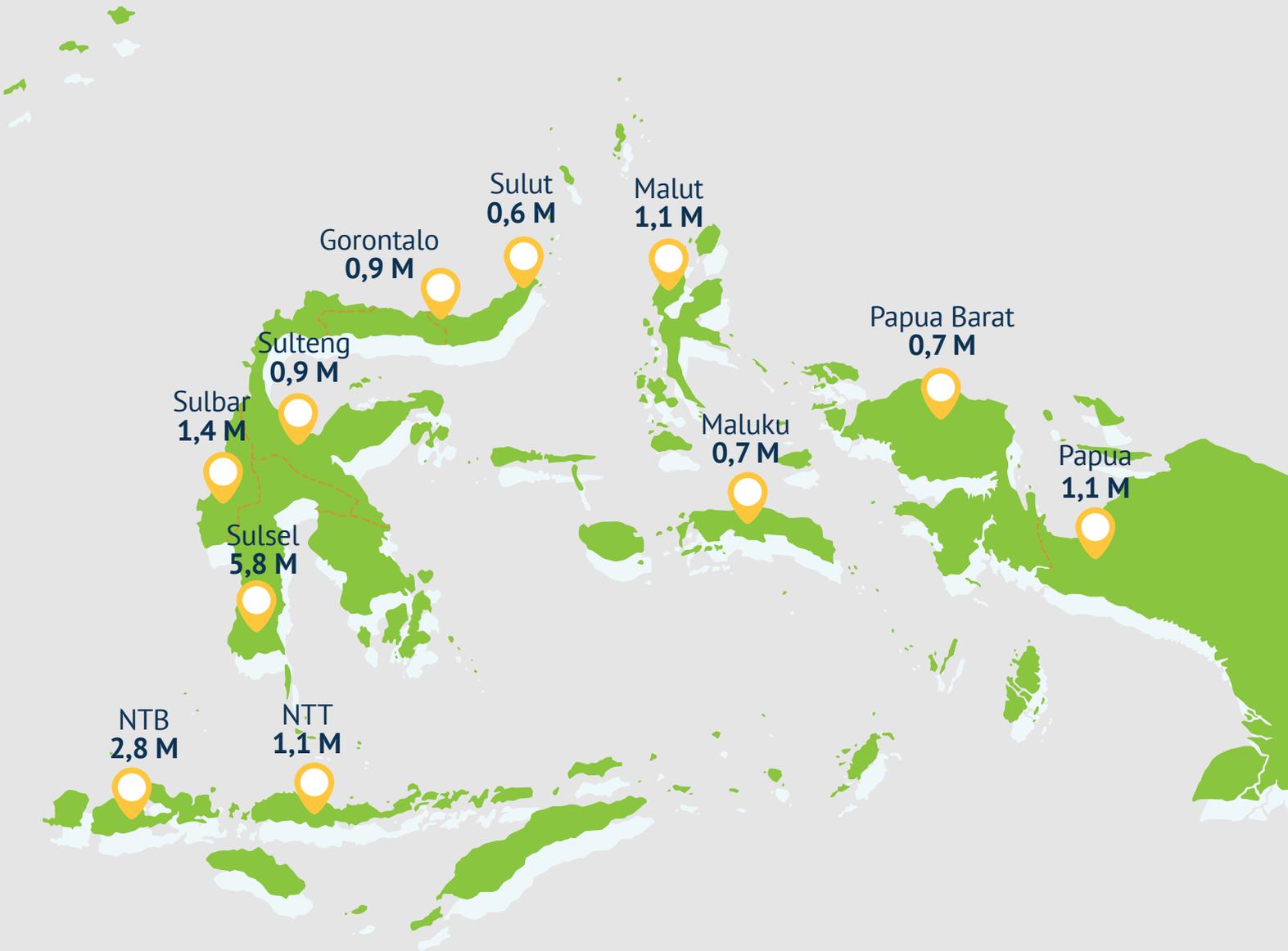
Badan Pengelola Keuangan Haji





Sebaran Wilayah dan Dana Pelaksanaan Program Kemaslahatan 2020





Distribusi kegiatan Kemaslahatan dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan jumlah Jemaah haji tunggu yang ada di tiap provinsi. Pada tahun 2020 sebaran dana Program Kemaslahatan terbesar adalah di Jawa Timur, yang merupakan provinsi dengan persentase jumlah Jemaah haji tunggu terbesar di Indonesia.

Selain itu Program Kemaslahatan yang dilaksanakan telah menjangkau 34 Provinsi di Indonesia, hal ini merupakan peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya menjangkau 15 Provinsi.



Ruang Lingkup Program Kemaslahatan

Merujuk pada Peraturan BPKH Nomor 2 Tahun 2019, distribusi penyaluran nilai manfaat dari Dana Abadi (DAU) menyasar ruang lingkup 6 (enam) kelompok kegiatan atau asnaf kemaslahatan. Program Kemaslahatan juga dapat mencakup kegiatan tanggap darurat yang ditujukan untuk mengatasi dampak bencana alam dan/atau bencana non-alam yang dinyatakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan BPKH Nomor 4 tahun 2020.

Bencana alam yang dimaksud adalah serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Sementara Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.



ASNAF	PROGRAM COVID-19	PROGRAM REGULER	TOTAL DISTRIBUSI	
			2020	2019
Pelayanan haji	-	-	-	131.483.631.691
Pendidikan dan dakwah	-	45.247.389.400	45.247.389.400	3.956.958.000
Sarana dan prasarana ibadah	7.740.000.000	18.913.099.500	26.653.099.500	6.489.073.750
Kesehatan	11.701.177.100	41.536.889.600	53.238.066.700	13.773.293.600
Ekonomi umat		1.001.150.000	1.001.150.000	-
Sosial keagamaan	24.818.183.080	5.686.046.542	30.504.229.622	836.870.000
Total	44.259.360.180	112.384.575.042	156.643.935.222	156.539.827.041

Berbeda dengan tahun sebelumnya, nilai manfaat pada asnaf pelayanan haji tidak dapat terealisasi. Kondisi pandemi yang dihadapi di sepanjang tahun 2020, telah mendorong Pemerintah Indonesia untuk mengambil kebijakan tegas untuk membatalkan keberangkatan Jemaah haji Indonesia. Sebagai upaya yang perlu dilakukan untuk melindungi kesehatan, keselamatan dan keamanan ratusan ribu Jemaah. Dengan demikian nilai manfaat yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan pelayanan ibadah haji tidak disalurkan.

Sejalan dengan Peraturan BPKH Nomor 4 tahun 2020, penanganan dampak Pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana non-alam, telah menjadi salah satu sasaran Program Kemaslahatan di tahun 2020. Penyaluran nilai manfaat pada masing-masing asnaf ditujukan secara spesifik untuk mendukung dan meringankan beban masyarakat serta tenaga medis di berbagai wilayah dalam memerangi wabah COVID-19 yang dampaknya mampu mempengaruhi tidak hanya pada kesehatan, namun juga seluruh aspek kehidupan.

Situasi darurat pandemi COVID-19 juga menjadi tantangan tersendiri bagi Bidang Kemaslahatan dalam menjalankan Program Kemaslahatan. Namun dengan berbagai ikhtiar, Bidang Kemaslahatan beserta Mitra Kemaslahatan tetap memegang teguh komitmen dalam memegang amanah umat. Beberapa kegiatan yang dalam rencana dilaksanakan dan selesai pada tahun 2020 tidak dapat terwujud, tetap dilanjutkan dan dijalankan hingga tahun 2021. Bidang Kemaslahatan terus melakukan pemantauan untuk memastikan kegiatan yang direncanakan dapat selesai dengan tuntas di tahun 2021.

Terlepas dari itu, Bidang Kemaslahatan cukup berbangga dengan pencapaian di tahun 2020. Asnaf ekonomi umat yang sejak awal diluncurkannya Program Kemaslahatan belum dapat diwujudkan, di tahun ini penyaluran nilai manfaat pada kegiatan asnaf tersebut telah berhasil direalisasikan. Dengan demikian nilai manfaat atas DAU yang ditujukan pada 6 (enam) asnaf Kemaslahatan telah lengkap. Selain itu jumlah kegiatan yang dilaksanakan juga meningkat dari xx kegiatan pada tahun 2019 menjadi 185 kegiatan di tahun 2020.

Terobosan lainnya pada Program Kemaslahatan mengoptimalkan pengelolaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat (DAU) adalah dengan menempatkan sebagian dana yang dialokasikan untuk asnaf kesehatan pada instrument Sukuk Negara atau SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Bersinergi dengan BWI selaku *nazhir* (pengelola) *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS), dana sebesar Rp25 miliar diinvestasikan untuk pengembangan rumah sakit mata. Khususnya, mendukung pengadaan alat kesehatan Retina Center, renovasi ruangan Retina Center dan subsidi pasien operasi retina yang akan melayani 1000 pasien operasi katarak.



Kegiatan Program Kemaslahatan 2020

PENDIDIKAN & DAKWAH

Pengadaan kendaraan operasional pendidikan



SARANA & PRASARANA IBADAH

Bantuan disinfektan untuk 1000 Masjid



Bantuan 1.000 Da'i



KESEHATAN

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)



Bantuan Sarana dan Prasarana untuk tenaga medis



EKONOMI UMAT

Program Pemberdayaan Usaha Tani Mandiri



Program Lumbung Pangan

SOSIAL KEAGAMAAN

Bantuan paket sembako



Bantuan hewan qurban



Pembangunan dan penyempurnaan bangunan pondok pesantren, asrama, ruang kelas baru (RKB)



Pembangunan asrama pondok pesantren



Pengadaan sarana pendidikan

Bantuan alat ibadah dan alat-alat kebersihan untuk korban banjir di Luwu



Pembangunan dan renovasi Masjid dan Musholla

Bantuan alat Kesehatan, Ventilator, Alat Pelindung Diri (APD), Kursi roda



Bantuan ruang isolasi dan karantina



Pengadaan ambulans



Bantuan Rumah Sakit Container



Bantuan untuk pemberdayaan petani kopra di Halmahera Utara

Bantuan kendaraan siaga untuk bencana alam



Bantuan kendaraan untuk layanan operasional zakat



Program ATM beras



Pemantauan dan Evaluasi

Amanah umat yang diemban oleh Bidang Kemaslahatan mencakup tanggung jawab atas dana yang disalurkan dengan mengukur efektivitas program yang dilaksanakan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan secara kualitatif maupun kuantitatif. Bidang Kemaslahatan berupaya untuk memastikan terjadinya dampak positif

sekaligus meminimalisir dampak negatif dari Program Kemaslahatan yang dijalankan. Mencakup evaluasi terhadap dampak kesehatan serta keselamatan penerima manfaat dari bantuan yang mereka terima. Seluruh program telah melalui evaluasi terkait hal ini.

Indikator Kinerja program Kemaslahatan





Pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemantauan kinerja dari setiap tahapan kegiatan yang dilakukan sampai akhir kegiatan selesai dilaksanakan melalui laporan secara berkala atau mengunjungi dan mengobservasi secara langsung jalannya kegiatan. Hasil pengukuran dan pemantauan selanjutnya dilakukan analisa dan evaluasi dengan tujuan : (1) memastikan bahwa sasaran program terpenuhi; (2) mengetahui

kendala dan sumber risiko yang relevan; (3) mengetahui peluang yang relevan; (4) membantu penanggung jawab program dalam mengelola sumber daya dan mengendalikan; (5) memastikan bahwa program yang dilaksanakan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (6) memastikan bahwa program yang dilaksanakan tetap berpegang kepada asas prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel.





Sinergi Bersama Mitra Kemaslahatan

Sinergi dan kolaborasi dengan Mitra Kemaslahatan tetap dipertahankan oleh Bidang Kemaslahatan BPKH dalam menjalankan amanahnya untuk mencapai tujuan peningkatan kemaslahatan bagi umat Islam. Mitra Kemaslahatan adalah organisasi kemaslahatan umat Islam lainnya yang ditetapkan secara resmi oleh BPKH. Menjalinkan kerjasama dan koordinasi dengan organisasi lembaga/ badan amil zakat atau wakaf merupakan langkah strategis yang diambil oleh Bidang Kemaslahatan untuk mencapai

tujuan utama meningkatkan kemaslahatan umat secara lebih efektif, efisien dan tepat sasaran.

Pemilihan, penunjukan dan penetapan Mitra Kemaslahatan dilakukan sesuai dengan mekanisme penyaluran nilai manfaat sebagaimana diatur pada Peraturan BPKH Nomor 2 Tahun 2019. Bidang Kemaslahatan BPKH memastikan kredibilitas mitra dalam menjalankan amanah umat, oleh karena itu syarat dan kriteria untuk menjadi Mitra

Distribusi Program Kemaslahatan Melalui Mitra Kemaslahatan



Nilai Manfaat yang Disalurkan
Rp1,5 miliar



Nilai Manfaat yang Disalurkan
Rp25 miliar



Nilai Manfaat yang Disalurkan
Rp28,14 miliar



Nilai Manfaat yang Disalurkan
Rp25,04 miliar



Nilai Manfaat yang Disalurkan
Rp19,22 miliar



Nilai Manfaat yang Disalurkan
Rp192 juta



Nilai Manfaat yang Disalurkan
Rp1,75 miliar



Nilai Manfaat yang Disalurkan
Rp1,64 miliar



Nilai Manfaat yang Disalurkan
Rp1,05 miliar

Kemaslahatan ditetapkan dan disesuaikan dengan Program Kemaslahatan yang akan dijalankan. Hubungan kerjasama BPKH dengan Mitra Kemaslahatan diatur dalam perjanjian kerjasama antara BPKH dan Mitra Kemaslahatan. Sebagai mitra kerjasama kinerja Mitra Kemaslahatan dipantau dan dievaluasi berdasarkan indikator kinerja program.

Sepanjang tahun 2020 BPKH melalui Bidang Kemaslahatan menjalin kerjasama dengan 16 Mitra Kemaslahatan. Namun demikian, hanya 14 Mitra Kemaslahatan yang turut aktif dalam menyalurkan dana kegiatan kemaslahatan kepada penerima manfaat.



NU CARE-LAZISNU

Nilai Manfaat yang
Disalurkan
Rp25,7 miliar



Nilai Manfaat yang
Disalurkan
Rp20,61 miliar



Nilai Manfaat yang
Disalurkan
Rp3,86 miliar



Nilai Manfaat yang
Disalurkan
Rp560 juta







**Meningkatkan
Kesejahteraan Umat**



Mendorong Produktivitas Umat



Pada tahun 2020, Program Kemaslahatan untuk pertama kalinya menyelenggarakan program yang ditujukan untuk asnaf Ekonomi Umat. Pada periode sebelumnya program ini belum terlaksana dikarenakan instrumen peraturan yang belum lengkap menjadi tantangan tersendiri untuk merealisasikannya.

BPKH berupaya merespon permasalahan kesenjangan ekonomi yang dihadapi umat Islam di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, sebagian besar umat Islam di Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Upaya-upaya mendorong perbaikan perekonomian umat Islam menjadi sangat signifikan, mengingat peningkatan taraf perekonomian umat dapat menjadi kunci untuk menyelesaikan masalah sosial lain yang dihadapi umat Islam di Indonesia saat ini.

Melalui Asnaf Ekonomi Umat, Program Kemaslahatan di desain untuk mendukung masyarakat dalam menciptakan mata pencaharian atau meningkatkan usaha mereka agar menjadi umat yang berdaya dan mandiri secara ekonomi. Pada tahun pertama pelaksanaan program Asnaf Ekonomi Umat, Program Kemaslahatan menyalurkan dana hibah sebesar Rp1.001.150.000 dari total pagu anggaran 1.850.000.000.

Porsi penyaluran nilai manfaat pada asnaf ini memang masih kecil yakni baru mencakup 1% dari total nilai manfaat yang disalurkan pada Program Kemaslahatan. Selain baru pertama kali diselenggarakan, hal ini antara lain juga dikarenakan penyelenggaraan kegiatan haruslah merujuk pada Peraturan Badan Pengelolaan Keuangan Haji (PBPBK) Nomor 2/2019 yang mensyaratkan mitra pelaksanaan Asnaf Ekonomi Umat harus badan/lembaga zakat yang telah mendapat akreditasi dari Kementerian Agama dan Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS). Sementara saat ini belum banyak lembaga/badan amil zakat atau wakaf yang memenuhi persyaratan tersebut.

Nilai manfaat yang diperuntukan pada Asnaf Ekonomi Umat disalurkan kepada pelaku usaha di sektor pertanian, peternakan maupun UMKM dalam bentuk hibah alat produksi, bantuan modal usaha, pembinaan dan pendampingan kelompok usaha warga atau kepala keluarga binaan. Program Kemaslahatan pada asnaf ini dijalankan dengan bersinergi bersama 3 (tiga) Mitra Kemaslahatan, yaitu Daarut Tauhid (DT) Peduli, Rumah Zakat, dan Laznas BSMU.



Program Pemberdayaan Usaha Tani Kopra di Maluku Utara

Mitra Kemaslahatan	Daarut Tauhid (DT) Peduli
Deskripsi Program	Program Petani Tangguh DT Peduli adalah program pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok petani mustahik. Total nilai hibah sebesar Rp449.900.000
Bentuk Program	<ul style="list-style-type: none">▶ Pemberian hak guna lahan▶ Hibah alat produksi dan sarana pertanian▶ Pembinaan/pelatihan manajemen usaha pertanian▶ Literasi keuangan rumah tangga▶ Pembinaan ruhiyah▶ Hibah kendaraan operasional Colt L300
Penerima Manfaat	14 petani kopra di Desa Igobula, Maluku Utara





Lumbung Pangan di Jawa Barat

Mitra Kemaslahatan	Rumah Zakat
Deskripsi Program	Bersama mitra Rumah Zakat, Program Kemaslahatan BPKH membantu masyarakat petani di desa binaan Rumah Zakat di Cianjur dan Majalengka, Jawa Barat. Selain itu untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat khususnya di masa Pandemi Covid seperti sekarang ini, Program Kemaslahatan BPKH juga menyelenggarakan program donasi beras setiap bulan bagi warga melalui mesin ATM beras. Total nilai hibah sebesar Rp96.250.000 .
Bentuk Program	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Hibah instalasi mesin penggilingan padi di Cianjur dan Majalengka. Masyarakat membayar penggunaan mesin penggiling dengan beras yang akan di donasikan keluarga melalui ATM Beras. ▶ Donasi beras melalui mesin ATM Beras di Majalengka
Penerima Manfaat	200 penerima manfaat dari 50 kepala keluarga (KK).

Mesin Pertanian Desa Berdaya Sejahtera Mandiri

Mitra Kemaslahatan	Laznas BSMU
Deskripsi Program	Program Kemaslahatan BPKH bermitra dengan Bank Syariah Indonesia dan LAZ Bangun Sejahtera Mitra Umat (Laz BSMU) membantu kelompok petani padi organik di desa berdaya Sejahtera Mandiri Rejosari di Daerah Rejosari, Lampung Tengah. Program ini berhasil membantu petani mustahik meningkatkan produksi gabah dan nilai jual beras sehat non pestisida yang dihasilkan di Desa Rejosari. Hibah yang dilakukan juga meningkatkan kualitas harga nilai jual beras dari para petani desa kepada masyarakat sebagai <i>end user</i> . Total nilai hibah sebesar Rp455.000.000.
Bentuk Program	Hibah alat produksi berupa alat pemisah warna beras (<i>color sorter</i>) dan alat pemisah batu (<i>destoner</i>).
Penerima Manfaat	Kelompok petani padi organik di Desa Rejosari, Lampung tengah. Penerima manfaat 100 orang.





Meningkatkan Nilai Tambah Produk Beras Organik Petani Lampung

Kelompok Petani Gaptera Sejahtera merupakan penerima manfaat dari program asnaf Ekonomi Umat dari Program Kemaslahatan BPKH tahun 2020 lalu. Kelompok tani yang telah terbentuk sejak 2018, ini memilih membudidayakan padi organik yang bebas pestisida. Mereka berharap dapat menyediakan beras sehat yang bebas residu pestisida dan zat kimia.

Meski demikian, upaya mereka menyehatkan masyarakat ini sering terkendala di pemasaran. Mereka mengaku produk beras organik mereka sulit bersaing dengan produk beras non organik yang memiliki tampilan dan kemasan lebih menarik.

“Kami petani mustahik awalnya malu untuk bersaing di pasar, ketika dijejerkan dengan produk beras lainnya kita kalah menarik. Ini terjadi karena produk beras organik kami masih dikemas dengan alat sederhana. Jadi banyak konsumen mengeluhkan tampilan beras yang kotor dan terkadang masih ada batunya.” Tutar Sukarlin, Ketua Kelompok Petani Gaptera Sejahtera pada acara penyerahan hibah beberapa waktu lalu.

“Rasa nasi dari beras organik kami enak, tapi banyak batunya,” kata Sukarlin.

Oleh karena itu, mewakili anggota kelompoknya, Sukarlin menyampaikan apresiasi atas bantuan hibah alat produksi yang diterima kelompoknya.

“Dengan adanya alat *colour softer* dan *destoner* yang diberikan, ini benar-benar sangat membantu produksi beras organik kami. Sekarang kami sangat percaya diri untuk bersaing dengan produk beras lainnya. Kami sudah tidak malu lagi menyandingkan produk beras kami dengan produk lain, karena? beras kami tampilannya menjadi bersih dan bebas batu,” ungkap Sukarlin.

Sementara itu, Suhendar, Ketua Lembaga Amil Zakat Bangun Sejahtera Mitra Umat (LAZ BSMU) mengatakan bantuan alat produksi dari asnaf Ekonomi Umat Program Kemaslahatan BPKH ini telah memungkinkan petani di Desa Rejosari memiliki pabrik pengolahan padi berskala menengah yang di kelola oleh kelompok petani. Keberadaan pabrik ini dapat mendukung daya saing dan keragaman produk beras yang dihasilkan petani setempat.

Hadir dalam acara penyerahan hibah asnaf Ekonomi Umat, Anggota Badan Pelaksana BPKH, Rahmat Hidayat, Program Kemaslahatan berharap kemitraan yang terjalin dapat terus berlangsung dan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat khususnya petani di desa Rejosari.

“Semoga kolaborasi ini menjadikan para petani yang saat ini menjadi mustahik, kedepan dapat menjadi *muzakki*. Dan setelah jadi muzakki mendaftar haji sehingga sempurna ke-Islaman kita.” Ungkapnya. (Youtube)

Membangun Pendidikan Umat



Pendidikan memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam agama Islam. Pendidikan dalam perspektif Islam ditempatkan sebagai pondasi dalam membentuk kepribadian Muslim agar mampu mengembangkan potensi rohani dan jasmani mereka sehingga tercipta sumber daya manusia unggul. Merekalah yang kemudian akan mendorong kemajuan bangsa dan negara serta mengukir peradaban.

Pendidikan Islam di tanah air saat ini tumbuh dan berkembang pesat. Perkembangan ini ditandai dengan terus bermunculannya lembaga pendidikan berbasis Islam di berbagai daerah. Hal ini tidak terlepas dari semakin besarnya minat masyarakat Muslim Indonesia untuk menyekolahkan anak-anak di lembaga pendidikan Islam, mulai dari Sekolah Islam Terpadu hingga lembaga pendidikan Islam klasik di Indonesia, pondok pesantren.

Seiring dengan perkembangan yang pesat ini, dunia pendidikan Islam juga masih menghadapi banyak tantangan. Selain kualitas pendidikan yang masih perlu terus dibenahi, banyak lembaga pendidikan Islam yang juga memiliki sarana dan prasarana yang masih terbatas, tidak sedikit yang memiliki kondisi bangunan yang memprihatinkan.

Berdasarkan pertimbangan inilah, isu pendidikan ditempatkan sebagai salah satu masalah umat yang krusial untuk di respon oleh Program Kemaslahatan. Melalui Asnaf Pendidikan dan dakwah, Program Kemaslahatan berupaya mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan dakwah Islam di tanah air yang saat ini juga menghadapi tantangan besar seiring dengan perkembangan era globalisasi.

Alokasi Anggaran Asnaf Pendidikan dan Dakwah



Total Realisasi Bantuan
Rp45.247.389.400
29%

Sepanjang tahun 2020 ini total dana bantuan yang disalurkan melalui Asnaf Pendidikan dan Dakwah mencapai Rp45.247.389.400 atau sekitar 29% dari total dana yang disalurkan Program Kemaslahatan. Jumlah ini merupakan alokasi dana kedua terbesar setelah alokasi dana untuk penanggulangan Pandemi COVID-19.

Melalui kegiatan ini, Program Kemaslahatan menyalurkan bantuan kepada lembaga pendidikan Islam untuk membenahi kualitas pendidikan, terutama sarana dan prasarana fisik. Sehingga generasi muda Islam dapat memperoleh pendidikan yang bermutu karena proses pendidikan yang mereka lalui di dukung oleh fasilitas dan peralatan yang memadai dan sesuai dengan tuntutan zaman.

Sementara untuk mendukung kemajuan dakwah Islam di Indonesia, aktivitas yang dilakukan antara lain dengan mendukung mobilitas lembaga dakwah melaksanakan tugas mereka di masyarakat seperti melalui pengadaan kendaraan operasional.

Lebih luas lagi, bantuan yang disalurkan juga diharapkan mampu menjaga wibawa kualitas pendidikan Islam di tanah air dengan mampu tumbuh dan berkembang menjadi lembaga pendidikan yang modern dan terus beradaptasi dengan perkembangan zaman.



Pengadaan Kendaraan Operasional

Untuk **6** lembaga pendidikan/dakwah
Daerah Cakupan: Riau, Jawa Barat, Jawa Timur,
Sumatera Utara, Banten,

Rp3.555.444.250



Pembangunan Sarana Air Bersih di sekolah islam

Bantuan sarana air bersih di **3** lembaga pendidikan/pondok pesantren
Daerah Cakupan: Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah

Rp870.078.000

Bantuan Sarana/Fasilitas Pendidikan

Bantuan untuk **8** lembaga pendidikan
Daerah Cakupan: Jawa Barat, Jawa Tengah, Papua, Banten

Rp11.521.893.900

Pembangunan Asrama Pondok Pesantren

12 pondok pesantren
Daerah Cakupan: Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Utara, Jawa Timur, DKI Jakarta, Riau, NTB

Rp16.492.084.750



Pembangunan Ruang Kelas

25 lembaga pendidikan/pondok pesantren
Daerah Cakupan: Sulawesi Selatan, Sumatera utara, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat

Rp10.702.271.500

Pembangunan Rumah Tahfidz

2 bangunan rumah tahfidz
Daerah Cakupan: Kalimantan Barat, Jawa Timur

Rp886.637.000



Pembangunan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT)

1 gedung SDIT
Daerah Cakupan: Jawa Barat

Rp1.100.000.000

Pembangunan Majelis Taklim Al Muhajirin Majalengka

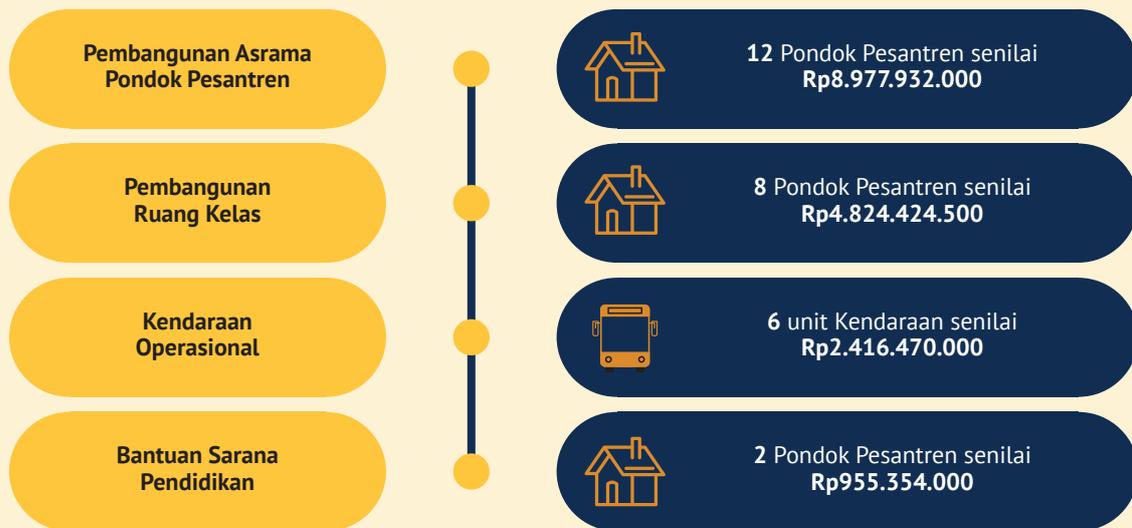
1 gedung Majelis Taklim
Daerah Cakupan: Jawa Barat

Rp118.980.000

Memperkuat Fungsi Strategis Pondok Pesantren

Salah satu aktivitas yang mendominasi di asnaf Pendidikan dan Dakwah selama tahun 2020 adalah bantuan untuk pondok pesantren di berbagai daerah di Indonesia. Total terdapat sebanyak 23 pondok pesantren yang mendapatkan bantuan.

Dana tersebut digunakan untuk melengkapi dan membenahi sarana dan prasarana fisik pondok pesantren mulai dari rehabilitasi/pembangunan ruang kelas, asrama bagi santri maupun kendaraan operasional.



Program Kemaslahatan melihat peningkatan kualitas fasilitas fisik di pondok pesantren ini menjadi penting karena terus meningkatnya minat dan kebutuhan masyarakat untuk mengakses pendidikan di Pondok Pesantren. Animo umat ini tentu saja harus di wadahi. Hal ini menimbulkan tantangan bagi penyelenggara pesantren untuk mampu memenuhi kebutuhan akan fasilitas fisik baik ruang kelas maupun asrama tempat tinggal yang memadai dan sesuai daya tampung yang ideal. Mengingat sistem pendidikan di pondok pesantren yang mewajibkan peserta didik bermukim atau tinggal di lingkungan pesantren.

Program Kemaslahatan memiliki tanggungjawab untuk merespon permasalahan ini mengingat fungsi strategis pondok pesantren di masyarakat. Seperti diketahui, pesantren tidak saja memiliki peran sebagai pusat pendidikan, tapi juga sebagai lembaga dakwah dan lembaga pemberdayaan

sosial. Oleh karena itu, keberadaan pesantren dapat mempercepat pembaharuan di masyarakat, termasuk perekonomian Islam.

Potensi ini didasarkan pada data dari Kementerian Agama Republik Indonesia, jumlah pesantren terdaftar di Indonesia pada tahun 2020 mencapai sekitar 30 ribu pesantren di berbagai wilayah di Indonesia dan memiliki kurang lebih 4 juta santri. Optimisme terhadap peran strategis pesantren ini dikukuhkan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Program Kemaslahatan berharap bantuan yang disalurkan ke pesantren dapat meningkatkan kualitas pendidikan di lembaga mustahik dan juga mampu memperkuat perkembangan dan eksistensi pendidikan di pondok pesantren yang ada di tanah air.



Menuai Manfaat Amal Kebajikan Dari Investasi Sosial Berbasis Syariah



Terobosan terbaru yang dilakukan Bidang Kemaslahatan dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat (DAU) adalah dengan menginvestasikan anggaran Program Kemaslahatan untuk pembelian Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS).

Hal ini merupakan salah satu inovasi produk keuangan syariah yang digagas Kementerian Keuangan dimana hasil penghimpunan dana yang diinvestasikan pada sukuk wakaf dengan imbal hasil investasi yang ditawarkan *fixed* 5,0 persen per tahun dengan tenor lima tahun. Investasi wakaf tunai yang terkumpul akan digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan berbagai aset sosial yang dibiayai oleh Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN).

Dengan berinvestasi melalui wakaf tunai ini masyarakat dapat tetap beribadah sekaligus membangun negeri. Manfaat wakaf yang dalam Islam dihitung sebagai amal Jariah akan terus mengalir selama aset tersebut

beroperasi dan menjangkau penerima manfaat yang lebih luas.

CWLS pertama kali diterbitkan pada 10 Maret 2020 dengan metode *private placement*, artinya, para peminat bisa mendapatkan *cash waqf* langsung beli dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) ditunjuk sebagai *nazhir* atau pengelola. Oleh BWI hasil investasi CWLS kemudian disalurkan untuk berbagai kegiatan-kegiatan sosial dan produktif seperti renovasi dan pembelian alat kesehatan, juga untuk pembelian ambulans, serta mendukung pembangunan dan optimalisasi Retina Center RS Achmad Wardi.

BPKH bersinergi dengan BWI menginvestasikan anggaran asnaf Kesehatan sebesar Rp25 miliar untuk ditempatkan pada instrumen pembiayaan pembangunan Rumah Sakit Mata Achmad Wardi yang berlokasi di Serang, Banten. Diharapkan kontribusi Program Kemaslahatan dalam mendukung program investasi sosial berbasis syariah CWLS yang akan menjadi sedekah jariah yang akan terus bersambung manfaatnya bagi umat.



Memerangi Kebutaan Melalui Investasi CWLS

Kebutaan dan gangguan penglihatan masih menjadi masalah kesehatan yang krusial di tanah air. Hingga saat ini, Indonesia tercatat sebagai negara dengan tingkat penderita katarak tertinggi di Asia Tenggara. Selain itu, katarak juga menjadi penyebab kebutaan tertinggi di tanah air yakni sebesar 81%. Data Kementerian Kesehatan mencatat jumlah penderita katarak di Indonesia mencapai 2,4 juta orang, angka ini terus bertambah satu persen setiap tahunnya. Hal yang sangat memprihatinkan adalah banyak penderita katarak masih berusia produktif.

Kondisi ini kian diperparah dengan timpangnya rasio tenaga medis ahli mata dengan jumlah operasi katarak yang harus dilakukan. Setiap tahun diperkirakan ada 80 ribu pasien yang harus menjalani operasi katarak. Meski demikian jumlah tenaga medis ahli mata (*ophthalmologist*) di Indonesia baru mencapai 2.325 dokter. Sehingga sering kali pasien katarak harus mengantri lama untuk bisa menjalani operasi katarak.

Untuk menekan jumlah kasus kebutaan di kalangan masyarakat, maka Program Kemaslahatan BPKH turut berpartisipasi dalam penggalangan dana wakaf untuk pembangunan Retina dan Glaukoma Center di RS Achmad Wardi Serang, Banten yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Sebagai *nazhir* atau pengelola, BWI menempatkan dana wakaf yang terkumpul pada program Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) yang diterbitkan Kementerian Keuangan.

Program Kemaslahatan menempatkan anggaran asnaf kesehatan yang bersumber dari Nilai Manfaat Dana Abadi Umat (DAU) sebesar Rp25 miliar pada program CWLS ini. Kontribusi Program Kemaslahatan mencakup 50% dari total dana wakaf yang

terkumpul yakni senilai Rp50.849.000.000,- (lima puluh miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta rupiah).

Selain untuk pembangunan kedua fasilitas tersebut, hasil investasi dari CWLS yang dibayarkan setiap bulan selama 5 tahun juga digunakan untuk pelayanan operasi katarak gratis bagi kaum duafa di RS Achmad Wardi. Pengelola rumah sakit yang terletak di Jl. Raya Taktakan Km. 1, Kelurahan Lontar Baru, Kecamatan Serang, Banten ini menargetkan jumlah duafa yang dilayani selama 5 tahun capai 2.513 pasien.

Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI), RS Mata Achmad Wardi menjadi salah satu Rumah Sakit percontohan dimana wakaf tunai yang disalurkan masyarakat atau lembaga bisa menjadi produktif dan mempunyai manfaat yang luas untuk masyarakat. Pemerintah Indonesia berencana mengadopsi pengembangan Rumah Sakit Wakaf melalui pembiayaan dana wakaf produksi seperti ini di seluruh Indonesia.

RS Achmad Wardi merupakan rumah sakit berbasis wakaf pertama di dunia. Saat ini rumah sakit ini melayani sekitar 2.000 pasien. Melalui kehadiran Retina dan Glaukoma Center ini diharapkan akan semakin banyak pasien katarak yang dapat ditangani, sehingga kasus kebutaan di dalam negeri dapat ditekan.





Supported by :



BPKH

Badan Pengelola Keuangan Haji





Mengoptimalkan Insan Kemaslahatan



Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan Program Kemaslahatan menjadi tanggung jawab dari Bidang Kemaslahatan yang berada di bawah supervisi Deputy Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan. Dari total anggaran Kemaslahatan tahun 2020, dapat diserap sebesar Rp44,259 M melalui 185 program Kemaslahatan. Namun dikarenakan terdapat kendala dalam proses persetujuan Program Kemaslahatan sehingga banyak proposal kegiatan kemaslahatan yang disetujui pada akhir tahun 2020 sehingga pelaksanaan program Kemaslahatan tahun 2020 sebagian besar dilaksanakan sampai dengan tahun 2021.

Pada tahun 2020 jumlah insan Kemaslahatan adalah sebanyak 6 (enam) orang termasuk deputy Kemaslahatan. Sepanjang tahun 2020, tidak terdapat penambahan insan Kemaslahatan namun dengan keterbatasan jumlah insan pada Bidang Kemaslahatan, seluruh personil berusaha untuk dapat menjalankan program Kemaslahatan secara maksimal.

Jika dilakukan benchmark dengan lembaga filantropi dan/atau CSR sejenis yang menjalankan program penyaluran bantuan dan kegiatan sosial serta besaran

dana penyaluran yang dikelola, jumlah ini terlihat tidak memadai. Meskipun jumlah insan berkembang tidak seimbang dengan peningkatan jumlah kegiatan Kemaslahatan namun kerjasama, komunikasi, dan hubungan sosial antar individu senantiasa dijaga untuk menciptakan atmosfer kerja yang baik. Selain itu, tujuan yang hendak dicapai dari Program Kemaslahatan, yaitu meningkatkan kemaslahatan umat terus ditanam sehingga mampu mendorong tim Kemaslahatan untuk bekerja secara optimal.

Sesuai dengan Peraturan BPKH Nomor 10 tahun 2018, seluruh pegawai dilakukan penilaian atas kinerjanya, minimal sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun. Tidak terkecuali insan Kemaslahatan, Selama periode tahun 2020 seluruh insan Kemaslahatan telah dievaluasi. Hasil evaluasi akan menjadi pertimbangan dalam rencana suksesi maupun peningkatan kompensasi yang diberikan. BPKH menghargai seluruh SDM yang dimilikinya, apresiasi ditunjukkan dengan memenuhi kewajiban atas remunerasi dan fasilitas yang berhak diterima sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Jumlah Insan Kemaslahatan

JUMLAH PEGAWAI	2020		2019		2018	
	 Laki-laki	 Perempuan	 Laki-laki	 Perempuan	 Laki-laki	 Perempuan
Berdasarkan usia						
< 30 tahun	0	1	0	2	0	1
30 – 50 tahun	5	1	4	0	3	0
> 50 tahun	0	0	0	0	0	0
Berdasarkan status ketenagakerjaan						
Permanen	5	1	4	1	3	1
Non-permanen	0	1	0	1	0	0
Subkon	0	0	0	0	0	0
Berdasarkan jabatan						
Deputi	1	0	1	0	1	0
Kadiv	1	0	1	0	1	0
Staff	3	2	2	2	1	1
Berdasarkan pendidikan						
> S2	1	0	1	0	1	0
S1 – S2	4	1	3	1	2	1
<S1	0	1	0	1	0	0

JUMLAH PEGAWAI	2020		2019		2018	
	 Laki-laki	 Perempuan	 Laki-laki	 Perempuan	 Laki-laki	 Perempuan
Jumlah Pegawai Baru						
< 30 tahun	0	0	0	1	0	1
30 – 50 tahun	0	0	1	0	3	0
> 50 tahun	0	0	0	0	0	0



Pengembangan SDM

Peraturan BPKH Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sistem Kepegawaian, pada Bab XI telah dijelaskan mengenai Pengembangan Pegawai dan sebagai upaya dalam meningkatkan produktivitas, keterampilan dan kemampuan SDM, BPKH menyelenggarakan program pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan keterampilan atau kemampuan yang diselenggarakan sendiri atau oleh badan-badan lain baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan kebutuhan.

Ruang lingkup pengembangan yang dilaksanakan tidak hanya mencakup keahlian teknis namun juga untuk meningkatkan kapasitas soft skill. Dengan demikian insan Bidang Kemaslahatan diharapkan memiliki kompetensi yang mumpuni untuk melaksanakan pekerjaannya secara profesional dan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam hal pengambilan keputusan, penyelesaian masalah dan menghasilkan output yang lebih berkualitas.

Insan Kemaslahatan didorong untuk memperluas pengetahuan dan ketrampilan, tidak hanya melalui program pengembangan/diklat yang telah ditetapkan,

namun juga membuka peluang untuk mengikuti pelatihan-pelatihan lain yang dapat mendorong kinerja mereka. Selain itu, belajar dari lembaga-lembaga nirlaba lainnya yang sejenis, juga terus ditanamkan. Sebagai upaya memperluas wawasan, membantu dalam beradaptasi terhadap tantangan yang dihadapi serta memberi inspirasi untuk memanfaatkan peluang yang muncul.

Pandemi COVID-19 yang berlangsung sepanjang tahun 2020 tidak menghentikan budaya belajar yang dibangun. Meskipun terjadi penurunan, kegiatan pengembangan SDM terus dijalankan secara daring memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia, merupakan langkah adaptasi dengan kondisi yang ada.

Pada tahun 2020, insan Bidang Kemaslahatan mengikuti pelatihan *GRI Certified Training Course and Assessment to Sustainability Report Specialists* yang diselenggarakan secara daring.

RATA-RATA JAM PELATIHAN	2020		2019		2018	
	 Laki-laki	 Perempuan	 Laki-laki	 Perempuan	 Laki-laki	 Perempuan
Level manajemen	16 jam	-	48 jam	-	-	-
Level karyawan non manajemen	16 jam	16 jam	32 jam	32 jam	16 jam	16 jam



RS Mata
Achmad Wardi



Supported CWLS:



ASDEP KIP



rsmataachmadwardi



RSAW Channel



www.rsmataachmadwardi





**Tata Kelola
Kemaslahatan**



Tata Kelola

Pasal 3 butir c Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji menyebutkan bahwa salah satu tujuan pengelolaan keuangan haji adalah untuk meningkatkan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Berlandaskan pada ketentuan tersebut, BPKH menyelenggarakan Program Kemaslahatan yang merupakan bagian dari fungsi BPKH untuk memberikan manfaat lainnya kepada umat.

Serangkaian peraturan sebagaimana disebutkan dalam pembahasan Program Kemaslahatan telah disusun dan disahkan, yang berfungsi sebagai pedoman dalam kegiatan operasional Program Kemaslahatan. Melengkapi hal ini, pada renstra tahun 2021, Bidang Kemaslahatan telah merencanakan akan menyusun *Standard Operational Procedure* (SOP) yang akan memberikan panduan mulai dari perencanaan hingga evaluasi program.

Pelaksanaan tata kelola yang baik merupakan tanggung jawab seluruh jajaran BPKH untuk membangun lembaga yang sehat, tangguh dan memenuhi prinsip-prinsip syariah. Evaluasi terhadap penerapan tata kelola dilakukan secara berkala. Penilaian dilakukan oleh Bidang Kepatuhan atau pihak independen lain sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun sekali.

Dalam rangka peningkatan kinerja tata kelola, BPKH juga menyusun *dashboard* dan mengembangkan sistem e-kemaslahatan. Inisiatif ini akan mulai efektif diimplementasikan di tahun 2021 dengan tujuan kinerja program kemaslahatan dapat diperoleh secara lebih sistematis, terukur dan *up-to-date*.





Asas Pengelolaan Keuangan Haji

BPKH berupaya untuk menjadi lembaga yang terpercaya dan dapat memberikan manfaat optimal bagi Jemaah haji dan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, pengembangan dan pengelolaan DAU yang merupakan bagian dari Dana Haji yang diamanahkan pengelolaannya kepada BPKH, menerapkan prinsip-prinsip dan asas yang diatur dalam Peraturan BPKH nomor 3 tahun 2018, yaitu :

1. **Prinsip Syariah;**
2. **Prinsip Kehati-hatian;**
3. **Asas Manfaat;**
4. **Asas Nirlaba;**
5. **Asas Transparan;**
6. **Asas Akuntabel.**



Organ Pengelola Program Kemaslahatan

Bidang Kemaslahatan memegang amanah dalam menjalankan Program Kemaslahatan dibawah supervisi Bidang Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan. Dalam pelaksanaannya Bidang Kemaslahatan memiliki kewajiban untuk tunduk dan patuh terhadap penerapan tata kelola yang berlaku di BPKH.

Anggota Badan Pelaksana Bidang Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan (Anggota A6) memiliki tugas dan fungsi serta tanggung jawab atas penyelenggaraan dukungan administrasi perkantoran, pengkoordinasian hubungan antar lembaga, pengelolaan kehumasan BPKH dan mengkoordinasikan kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam.

Deputi Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan bertugas mengkoordinasikan atas penyelenggaraan dukungan administrasi perkantoran, pengkoordinasian hubungan antar lembaga, pengelolaan kehumasan BPKH dan mengkoordinasikan kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam.

Kepala Divisi Kemaslahatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi seluruh program kemaslahatan, mulai dari penerimaan proposal, analisa dan persetujuan, pencairan, pelaksanaan, monev dan pelaporan pertanggung jawaban meliputi kegiatan pelayanan

ibadah haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi umat, serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah.

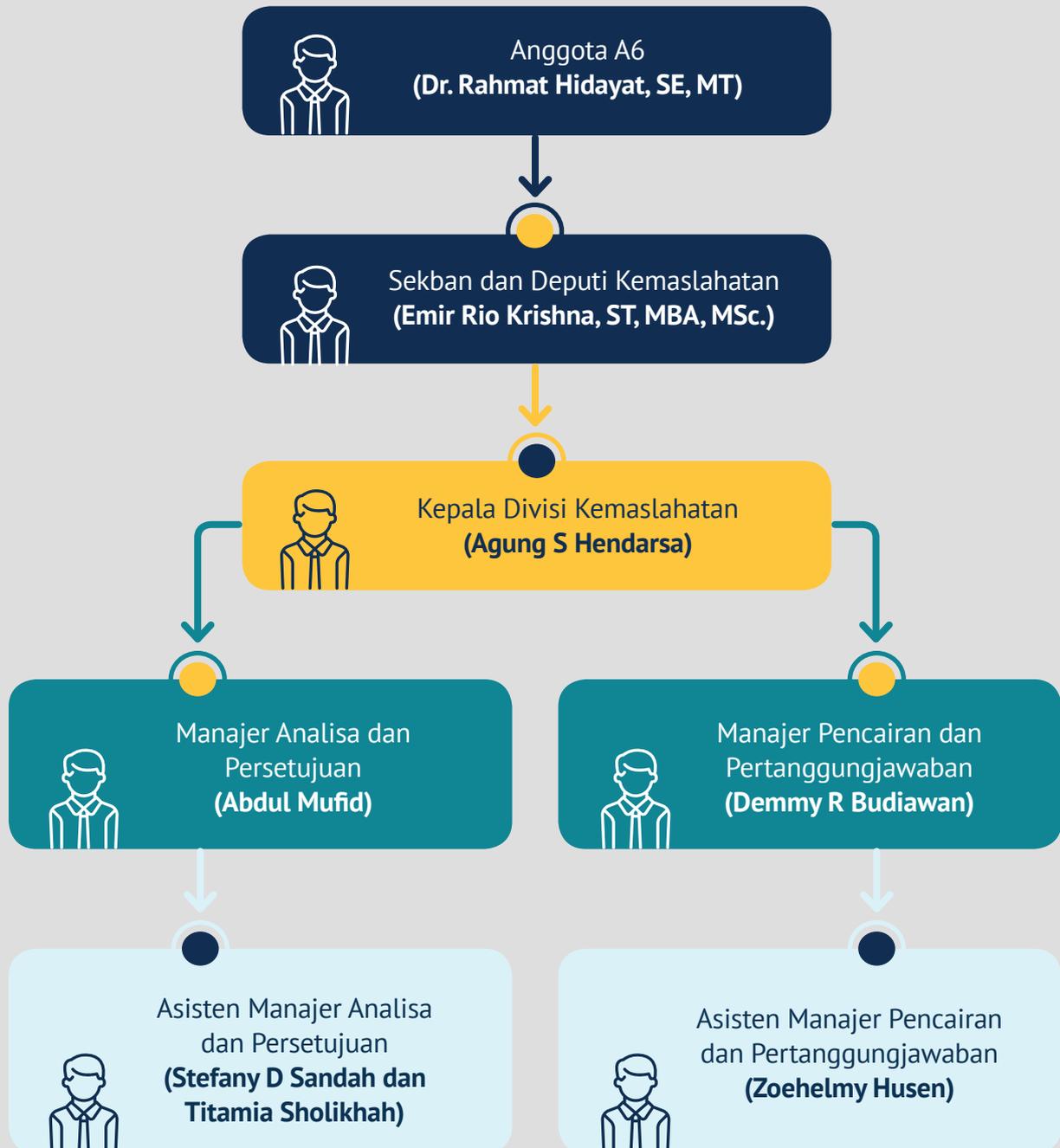
Di tahun 2021, guna meningkatkan independensi dan mencegah terjadinya *conflict of interest*, pembagian divisi akan dilakukan. Divisi yang menerima dan mengusulkan persetujuan akan berbeda dengan bagian yang mencairkan dan melaksanakan serta memonitoring pelaksanaan program oleh Mitra Kemaslahatan.

Divisi Registrasi dan Analisa Kemaslahatan terdiri dari 1 Kepala Divisi, 2 Manager dan 2 Asisten Manager yang memiliki fungsi perencanaan program prioritas kemaslahatan, penerimaan proposal, analisa dan persetujuan. Divisi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Kemaslahatan terdiri dari 1 Kepala Divisi, 2 Manager dan 1 Asisten Manager, memiliki fungsi perikatan, pencairan, monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan kemaslahatan dan pelaporan pertanggung jawaban. Kelengkapan organ pendukung ini akan memberikan penajaman tugas dan fungsi terhadap kedua Divisi tersebut.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang individu maupun kolektif dari organ Kemaslahatan dapat dilihat pada Laporan Tahunan BPKH.



Struktur Organisasi Kemaslahatan





Manajemen Risiko

BPKH memastikan bahwa seluruh potensi risiko yang dapat menghambat tercapainya visi, misi dan tujuan BPKH telah diidentifikasi, diukur, dipantau dan dimitigasi. Pengelolaan risiko mengacu kepada Kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko yang telah disusun dan menjadi pedoman utama bagi seluruh insan BPKH.

Penerapan Manajemen Risiko di BPKH merupakan bagian dari penerapan *Governance, Risk and Compliance* (GRC). Fokus penerapan Manajemen Risiko harus menciptakan nilai tambah, terintegrasi dan efektif, bagian dari proses pengambilan keputusan, transparan, sistematis, terstruktur dan dinamis.

Sesuai Peraturan BPKH no 3 tahun 2018, BPKH membentuk Bidang Manajemen Risiko yang terdiri dari 2 (dua) divisi, yaitu Divisi Manajemen Risiko Bisnis dan

Divisi Manajemen Risiko Korporasi. Sebagai panduan dalam mengelola risiko, pedoman manajemen risiko disusun dan ditinjau minimal setiap 2 (dua) tahun sekali atau jika terjadi perubahan visi, misi dan sasaran manajemen risiko.

Pengelolaan risiko menjadi tanggung jawab dari masing-masing Divisi sebagai pemilik risiko (*risk owner*), termasuk divisi pada Bidang Kemaslahatan. Peranan *Risk Owner* sangat penting sebagai garis depan atau ujung tombak dalam mengelola dan mengendalikan risiko. Dalam hal proses bisnis Bidang Kemaslahatan, risiko yang tercakup, terdiri dari 2 (dua) risiko, yaitu: (1) risiko reputasi; dan (2) risiko keberlanjutan.



Kode Etik

Seluruh insan Bidang Kemaslahatan harus patuh dan tunduk pada Kode Etik yang ditetapkan oleh BPKH. Kode etik ini bertujuan untuk menciptakan standar perilaku yang baik secara moral dan profesional dalam melaksanakan tugas untuk dan atas nama lembaga, maupun dalam berinteraksi dan berhubungan dengan

sesama rekan kerja, dengan atasan maupun bawahan. Pedoman Etika Kerja yang dimiliki BPKH menjadi sarana untuk membentuk budaya kerja yang positif. Pedoman ini memberikan acuan perilaku yang harus dilakukan oleh seluruh insan BPKH dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari.

Kode etik BPKH mencakup:

1. Penegakan integritas
2. Menjaga kerahasiaan
3. Larangan penyalahgunaan jabatan
4. Kepatuhan penggunaan dokumen
5. Larangan benturan kepentingan.



Isi Etika Kerja atau tata perilaku pejabat dan pegawai meliputi:

1. Kepatuhan terhadap hukum
2. Benturan kepentingan
3. Pengendalian gratifikasi
4. Anti diskriminasi
5. Integritas laporan keuangan
6. Perlindungan informasi BPKH
7. Informasi orang dalam (insider trading)
8. Perlindungan harta BPKH
9. Kegiatan sosial dan politik
10. Perilaku etis terhadap sesama karyawan.

Anti Korupsi

Didalam Peraturan BPKH No.3 Tahun 2018 telah diatur mengenai Larangan Penerimaan dan Pemberian Gratifikasi dalam bentuk dan keadaan apapun untuk mempengaruhi Insan BPKH melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam kapasitas jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban dan/atau bertentangan dengan independensi dan objektivitas dalam pengambilan keputusan.

Selain diatur dalam Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji, ketentuan mengenai gratifikasi juga

diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pelaksana Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi.

Di tahun 2020, BPKH juga telah memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Dengan diperolehnya sertifikasi ISO 37001:2016 membuktikan bahwa BPKH telah berkomitmen mendukung program pemerintah untuk mencegah tindakan korupsi dengan menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berbasis SNI ISO 37001:2016.



Sistem Pelaporan Pelanggaran

Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran di BPKH mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan Haji. Peraturan yang sama juga memberikan jaminan kerahasiaan dan perlindungan bagi Pelapor pelanggaran.

Seluruh pemangku kepentingan dapat menyampaikan pengaduan melalui telepon, sms dan Whatsapp di nomor 085319000140/085319000150 atau telepon kepada Anggota Badan Pelaksana Bidang Kepatuhan dan/atau petugas khusus di bawah Bidang Kepatuhan yang ditunjuk (disebut "*Whistleblower Officer*" atau

"*WB Officer*"). BPKH juga telah memiliki aplikasi *Whistleblowing System* yang tersedia di website resmi BPKH yang beralamat di wbs.bpkh.

Pelapor baik pihak internal maupun pihak eksternal dapat menyampaikan kecurigaannya maupun ketidakpuasannya terkait pelanggaran yang dapat terdiri, namun tidak terbatas atas pelanggaran berupa *fraud*, kesalahan operasional yang signifikan, pelanggaran ketentuan BPKH, pelanggaran kode etik BPKH, benturan kepentingan (*conflict of interest*), tindakan melanggar etika dan moral, tindakan melanggar hukum pidana maupun hukum perdata ataupun peraturan perundang-undangan lainnya.



Pelibatan Pemangku Kepentingan

Memahami kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan program untuk mencapai tujuannya yaitu meningkatkan kemaslahatan umat Islam. Melalui pelibatan pemangku kepentingan, Bidang Kemaslahatan merumuskan program-program

dan membuat kebijakan dalam menjalankan aktivitasnya dengan penuh tanggung jawab. Pemangku kepentingan diidentifikasi berdasarkan pertimbangan atas pengaruh dampak terhadap Program Kemaslahatan.

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	KEPENTINGAN DAN HARAPAN/ISU YANG RELEVAN	METODE DAN FREKUENSI KETERLIBATAN
1.	Badan Pelaksana BPKH	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan dana sesuai target - Keberlanjutan program - Kepatuhan peraturan - Eksistensi BPKH (syiar dan <i>branding</i>) 	Rapat badan pelaksana (1x/minggu) Rakor dengan anggota badan pelaksana (setiap hari)
2.	Dewan Pengawas BPKH	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan dana sesuai target - Keberlanjutan program - Kepatuhan peraturan - Eksistensi BPKH (syiar dan <i>branding</i>) 	Rapat gabungan (1x/bulan) Laporan bulanan
3.	Kementerian Agama	<ul style="list-style-type: none"> - Program prioritas - Program pendukung pelaksanaan ibadah haji 	Rapat prioritas (awal tahun, atau saat ada perubahan)
4.	Komisi VIII DPR	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan dana - Program 	Laporan, Alokasi besaran anggaran Usulan program (proposal)
5.	Mitra Kemaslahatan (Lembaga non profit)	<ul style="list-style-type: none"> - Program - Sumber dan jumlah penggunaan dana 	Rapat Koordinasi
6.	Penerima Manfaat	<ul style="list-style-type: none"> - Program 	Sosialisasi
7.	Kementrian Keuangan	Sumber penempatan dana dan jumlah dana	Rapat penempatan DAU (1x/tahun)
8.	Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Program - Sumber dan jumlah penggunaan dana 	Sosialisasi Mempublikasi kegiatan di berbagai media
9.	Presiden	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan dana - Kepatuhan peraturan 	Laporan melalui Kementerian Agama
10.	Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Work life balance</i> - Tata Kelola - Transparansi - Penilaian kinerja - Pengembangan 	<i>Gathering</i> , pelatihan





Tentang Laporan



Profil Laporan

Laporan Program Kemaslahatan tahun 2020 ini menyajikan informasi kinerja Program Kemaslahatan untuk periode 1 Januari hingga 31 Desember 2020. Laporan yang ketiga ini mengusung tema laporan “Memaksimalkan Ikhtiar untuk Kebaikan Umat”. Bidang Kemaslahatan BPKH menerbitkan laporan setiap tahun dengan tujuan untuk memberikan informasi secara transparan mengenai upaya yang telah dilakukan untuk memberikan kontribusi bagi kemaslahatan umat Islam.

Bidang Kemaslahatan menyusun laporan ini merujuk pada Standar Laporan Keberlanjutan dari *Global Reporting Initiative (GRI)*. Bidang Kemaslahatan BPKH bukanlah lembaga yang yang diwajibkan menerbitkan laporan keberlanjutan, namun laporan ini juga disusun merujuk pada Lampiran II Peraturan Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Ruang Lingkup dan Batasan

Seluruh aktivitas yang dilakukan oleh Bidang Kemaslahatan BPKH selama tahun 2020 menjadi fokus utama dalam laporan ini, termasuk kinerja serta dampak yang diakibatkannya.

Kontak

Sebagai lembaga keuangan yang transparan dan profesional kami terbuka untuk setiap masukan, saran, kritik dan pertanyaan sebagai upaya kami dalam rangka meningkatkan kualitas laporan. Saran, masukan, pertanyaan dapat ditujukan ke :

BIDANG KEMASLAHATAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH)



Menara Bidakara 1, lantai 8
Jalan Gatot Subroto, Kav. 71-73
Pancoran, Jakarta Selatan 12870,
Indonesia



Telp : (021) 83793001



Call Center Kemaslahatan : 08882298820



Email : kemaslahatan@bpkh.go.id



Penentuan Kandungan Laporan

Penentuan Kandungan Laporan

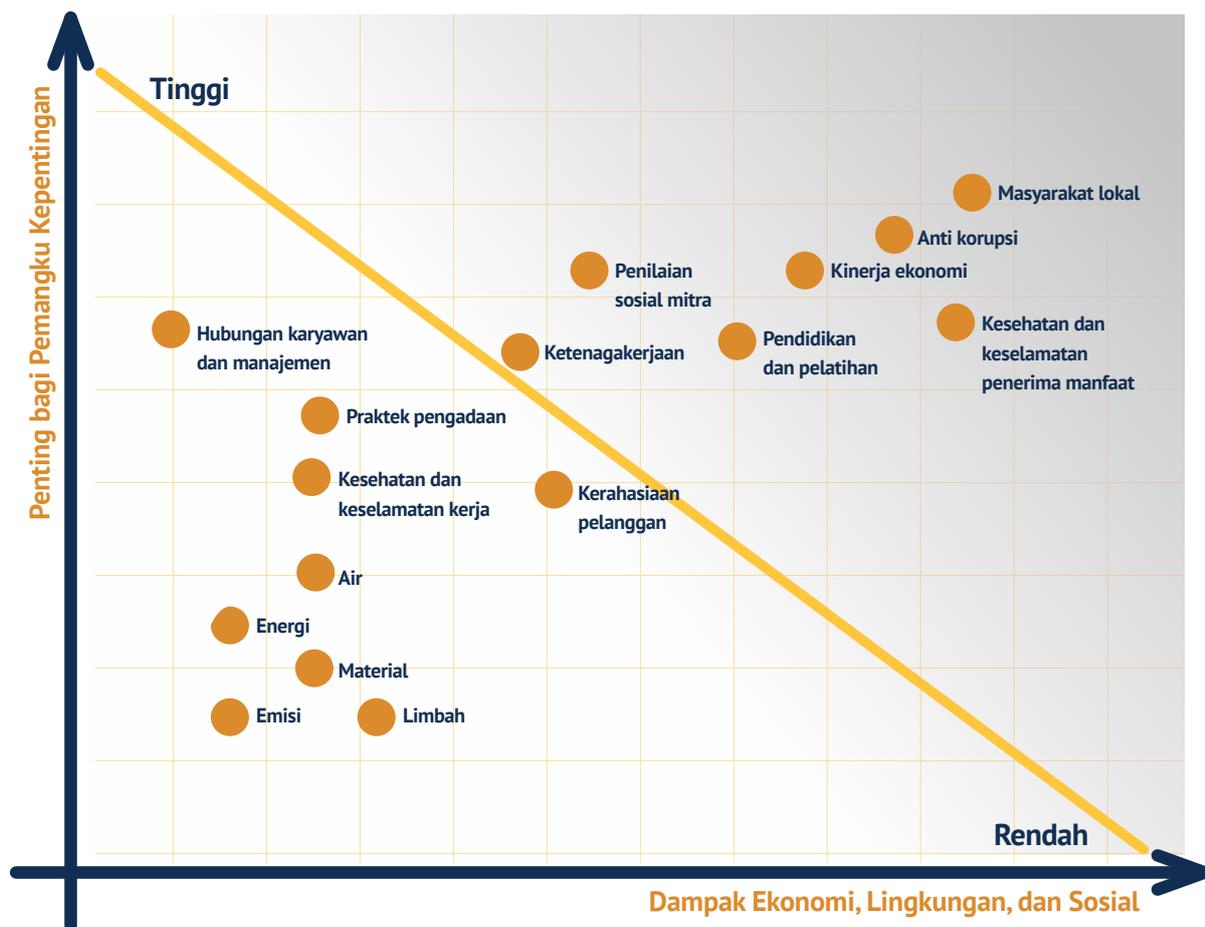
Dalam proses menentukan kandungan laporan keberlanjutan ini, kami menerapkan prinsip-prinsip penentuan kandungan laporan sesuai dengan ketentuan Standar GRI, yang mencakup:

- Pelibatan pemangku kepentingan
- Materialitas
- Konteks keberlanjutan
- Kelengkapan

Topik Material dan Batasannya

Topik material pada laporan keberlanjutan periode 2020 ini kami sajikan berdasarkan hasil peninjauan dari laporan yang disajikan pada tahun sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menentukan informasi material yang paling relevan untuk kami sajikan kepada para pemangku kepentingan.

Proses peninjauan dilakukan secara internal, melibatkan para penanggung jawab yang relevan dengan topik yang material. Berdasarkan hasil focus group discussion, topik material yang disajikan pada periode ini tidak ada perubahan dibandingkan dengan periode sebelumnya.





Topik Material dan Batasannya

TOPIK MATERIAL	MENGAPA MATERIAL	STANDAR GRI	BATASAN			
			BIDANG KEMASLAHATAN	BPKH	MASYARAKAT	MITRA
Masyarakat lokal	Program kemaslahatan ditujukan untuk masyarakat lokal, khususnya umat Islam	413	✓	✓	✓	
Kinerja ekonomi	Salah satu fokus perhatian Pemangku Kepentingan dan Bidang Kemaslahatan	201	✓	✓	✓	
Anti korupsi	Bagian dari tata kelola lembaga yang harus diterapkan di seluruh manajemen dan pegawai	205	✓	✓	✓	
Kesehatan dan keselamatan penerima manfaat	Tujuan program adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi umat, kesehatan dan keselamatan tentunya menjadi bagian dari hal ini	416	✓	✓	✓	
Penilaian sosial mitra	Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Kemaslahatan merupakan kegiatan sosial yang spesifik untuk kemaslahatan umat. Maka penting bagi lembaga untuk bekerja sama dengan mitra yang memiliki visi yang sama.	414	✓	✓		✓
Pendidikan dan pelatihan	Memiliki pegawai dengan kompetensi yang mumpuni memungkinkan kegiatan dapat dilakukan secara optimal	404	✓			
Ketenagakerjaan	Pegawai merupakan sumber daya yang paling penting bagi lembaga sebagai penggerak kegiatan Program Kemaslahatan	401	✓			

Indeks Standar GRI

PENGUNGKAPAN		HALAMAN	
GRI 102: Pengungkapan Umum		PROFIL ORGANISASI	
	102-1	Nama organisasi	19
	102-2	Merek, produk, dan jasautama	19
	102-3	Lokasi kantor pusat	19
	102-4	Jumlah negara tempat operasi	19
	102-5	Sifat kepemilikan dan badan hukum	19
	102-6	Pasar yang dilayani	19
	102-7	Skala organisasi	19
	102-8	Informasi terkait karyawan dan pekerja lain	57
	102-9	Rantai pasokan organisasi	40
	102-10	Perubahan signifikan selama periode pelaporan	Tidak ada
	102-11	Prinsip kehati-hatian	66
	102-12	Inisiatif Eksternal	Tidak ada
	102-13	Keanggotaan asosiasi	Tidak ada
			STRATEGI
	102-14	Pernyataan dari manajemen puncak	8
			ETIK DAN INTEGRITAS
	102-16	Nilai-nilai, standar dan norma-norma perilaku	67
	102-17	Mekanisme permintaan nasihat dan pertimbangan terkait etik	67
			TATA KELOLA
	102-18	Struktur tata kelola	65
			PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN
	102-40	Daftar kelompok pemangku kepentingan	69
	102-41	Perjanjian Kerja Bersama	69
	102-42	Identifikasi dan pemilihan pemangku kepentingan	69
	102-43	Pendekatan untuk melakukan pelibatan pemangku kepentingan	69
	102-44	Topik dan perhatian utama	69
			PRAKTIK PELAPORAN
	102-45	Entitas yang dicakup dalam laporan keuangan konsolidasian	72
	102-46	Proses untuk menetapkan isi laporan dan Batasan topik	73
	102-47	Daftar topik material	74
	102-48	Pernyataan ulang atas informasi	Tidak ada
	102-49	Perubahan dalam pelaporan	Tidak ada
	102-50	Periode pelaporan	72
	102-51	Tanggal laporan paling terakhir	72
	102-52	Siklus pelaporan	72
	102-53	Poin Kontak atas pertanyaan terkait laporan ini	72
	102-54	Klaim pelaporan yang 'sesesuaian dengan' Standar GRI	72
	102-55	Indeks GRI	75
	102-56	Pemeriksaan eksternal	Tidak ada



PENGUNGKAPAN			HALAMAN
		KINERJA EKONOMI	
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016	103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya	74
	103-2	Pendekatan Manajemen dan Komponennya	25
	103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen	25
GRI 201 Kinerja Ekonomi 2016	201-1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan	25
		ANTI KORUPSI	
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016	103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya	74
	103-2	Pendekatan Manajemen dan Komponennya	67
	103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen	67
GRI 205 Anti Korupsi 2016	205-1	Komunikasi dan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi	67
		KETENAGAKERJAAN	
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016	103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya	74
	103-2	Pendekatan Manajemen dan Komponennya	56
	103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen	56
GRI 401: Ketenagakerjaan 2016	401-1	Tenaga Kerja Baru dan Turnover	57
		PELATIHAN DAN PENDIDIKAN	
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016	103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya	74
	103-2	Pendekatan Manajemen dan Komponennya	58
	103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen	58
GRI 404- Pelatihan dan Pendidikan 2016	404-1	Jam pelatihan rata-rata per tahun per karyawan menurut gender, dan menurut kategori karyawan	58
		MASYARAKAT LOKAL	
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016	103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya	74
	103-2	Pendekatan Manajemen dan Komponennya	34
	103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen	38

PENGUNGKAPAN			HALAMAN
GRI 413 Masyarakat Lokal 2016	413-1	Operasi dengan pelibatan masyarakat, penilaian dampak, dan program pengembangan	44
		PENILAIAN SOSIAL SUPPLIER	
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016	103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya	74
	103-2	Pendekatan Manajemen dan Komponennya	40
	103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen	40
GRI 414 Penilaian Sosial Supplier 2016	414-1	Supplier baru yang dinilai berdasarkan kriteria sosial	40
		KESEHATAN DAN KESELAMATAN PELANGGAN	
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016	103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya	74
	103-2	Pendekatan Manajemen dan Komponennya	38
	103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen	38
GRI 416 Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan 2016	416-1	Penilaian dampak kesehatan dan keselamatan produk dan jasa	38



Indeks POJK-51/2017

INDEKS	KRITERIA	HALAMAN
A	Strategi Keberlanjutan	
A.1	Penjelasan strategi keberlanjutan	27
B	Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan	4
C	Profil singkat organisasi	
C.1	Visi, misi dan nilai	20
C.2	Nama, alamat, nomor telepon, faksimili, alamat surat elektronik dan situs web	19
C.3	Skala usaha	19
C.4	Penjelasan singkat mengenai produk, layanan dan kegiatan yang dijalankan	19
D	Penjelasandireksi	
D.1	Kebijakanuntukmerespondantangandalampemenuhan strategi keberlanjutan	9
D.2	Penerapan keuangan berkelanjutan	9
D.3	Strategi pencapaian target	9
E	Tata kelola keberlanjutan	
E.1	Uraian mengenai tugas bagi Direksi dan Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan	64
E.2	Penjelasan mengenai pengembangan kompetensi yang dilaksanakan terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggungjawab penerapan Keuangan Berkelanjutan	64
E.3	Penjelasan mengenai prosedur LJK, Emiten dan Perusahaan Publik dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko atas Keuangan Berkelanjutan	66
E.4	Penjelasan mengenai pemangku kepentingan	69
E.5	Permasalahan yang dihadapi	35
F	Kinerja keberlanjutan	
F.1	Penjelasan mengenai budaya keberlanjutan	67
F.2	Uraian mengenai kinerja ekonomi dalam tiga tahun terakhir	26
	Aspek Ketenagakerjaan	
F.22	Pelatihan dan Pengembangan Kemampuan Pegawai	58
	Aspek Masyarakat	
F.23	Dampak Operasi Terhadap Masyarakat Sekitar	44
F.24	Pengaduan Masyarakat	68

INDEKS	KRITERIA	HALAMAN
F.25	Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL)	34
	Tanggung Jawab Pengembangan Produk/Jasa Berkelanjutan	
F.27	Produk/Jasa Yang Sudah Dievaluasi Keamanannya Bagi Pelanggan	38
F.28	Dampak Produk/Jasa	44
G	Lain-lain :	
G.3	Lembar Umpan Balik	80
G.5	Daftar Pengungkapan Sesuai POJK 51/2017	78



Lembar Umpan Balik

Laporan Kemaslahatan Tahun 2020 memberikan informasi mengenai kegiatan Program Kemaslahatan yang dijalankan selama periode tersebut. Kami sangat berharap untuk dapat menerima masukan, umpan balik atau saran

untuk perbaikan di masa mendatang. Anda dapat mengisi lembar umpan balik ini dan mengirimkannya kembali kepada kami.

Nama :
Institusi :
Email :
No. Kontak :

Group pemangku kepentingan

- Penerima Manfaat
- Masyarakat Umum
- Pemerintah (pusat/daerah)
- Media
- Mitra Kemaslahatan
- Komunitas Perhajian
- Lainnya (sebutkan)

Mohon pilih jawaban yang paling sesuai dengan memberikan tanda ✓ :

1. Laporan ini mencakup informasi yang menjadi perhatian Anda
 Ya Tidak
2. Laporan ini memberikan informasi secara menyeluruh dan transparan
 Ya Tidak
3. Laporan ini menarik dan dirancang dengan baik
 Ya Tidak
4. Topik apakah yang menurut Anda paling informatif dan bermanfaat ?
.....
5. Selain yang telah disajikan, informasi apakah yang ingin Anda peroleh melalui laporan ini ?
.....
6. Harap berikan masukan dan saran bagaimana kami dapat membuat laporan ini lebih baik di masa mendatang
.....

Terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu mengisi lembar umpan balik ini. Silahkan kirimkan lembar ini kepada kami melalui kontak yang tersedia

Divisi Kemaslahatan

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
Menara Bidakara 1, lantai 5 Jalan Gatot Subroto, Kav. 71-73 Pancoran, Jakarta Selatan 12870, Indonesia
Telp : (021) 83793001
Email : kemaslahatan@bpkh.go.id



dtpeduli

dtpeduli

SEMBAK

BPKK

Badan Pengelola Keuangan Haji

dtpeduli



#BPKHmaslahat

BIDANG KEMASLAHATAN



BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH)

Menara Bidakara 1, lantai 8 Jalan Gatot Subroto,
Kav. 71-73 Pancoran, Jakarta Selatan 12870, Indonesia

Telp : (021) 83793001

Call Center Kemaslahatan : 08882298820

Email : kemaslahatan@bpkh.go.id

www.bpkh.go.id